



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026



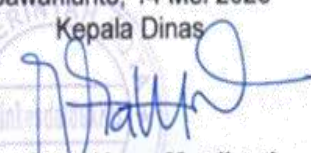
**Jln. Drs. H. Shaemory WS No. 1 Desa Sikalang
Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto
Provinsi Sumatera Barat
No. Telp (0754). 61030**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu Tahun 2024-2026 dengan penekanan pada pencapaian program prioritas, Standar pelayanan Minimal (SPM) dan *Sustainable Development Goals* (SDG's). Renstra merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB serta berpedoman kepada RPJMD. Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB dalam kurun waktu 2024-2026 dan merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB dengan Kepala Daerah. Karena itu program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra harus terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.

Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB disusun untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan selama periode 2024-2026 dengan harapan derajat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2024-2026 ini. Semoga tujuan pembangunan kesehatan di Kota Sawahlunto dapat terwujud dengan dukungan semua pihak.

Sawahlunto, 14 Mei 2023
Kepala Dinas

dr. Rano Verra Mardianti
Pembina/IV.a
NIP. 198303072010012029



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum Penyusunan
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
3.2	Isu Strategis
3.3	Penentuan Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan dan Sasaran
4.2	Cascading Renstra Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
BAB VIII	PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan jenis Kepegawaian Dinas kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2022	21
Tabel 2.2	: Data Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan Tahun 2022	23
Tabel 2.3	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana Kota Sawahlunto	25
Tabel 2.4	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	29
Tabel 2.5	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BLUD UPTD RSUD Kota Sawahlunto	62
Tabel 3.1	: Jumlah Kematian Ibu di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022	68
Tabel 3.2	: Angka Kesembuhan Lengkap Serta Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Per Puskesmas Se Kota Sawahlunto Tahun 2022	71
Tabel 3.3	: Persentase Angka Notifikasi Kasus TB (CNR) Di Puskesmas Se Kota Swahlunto Yahun 2022	71
Tabel 3.4	: Pemetaan Permasalahan Pelayana Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota sawahlunto	76
Tabel 3.5	: Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sumatera Barat	77
Tabel 4.1	: Target Kinerja, Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	80
Tabel 5.1	: Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	86
Tabel 6.1	: Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 sampai dengan 2026 Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	93
Tabel 7.1	: Rencana Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah	128



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Struktur Organisasi BLUD RSUD Kota Sawahlunto	19
Gambar 2.2	: Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	20
Gambar 3.1	: Angka Kematian Bayi di Kota sawahlunto Tahun 2018-2022	67
Gambar 3.2	: Pelayanan Penderita Hipertensi Tahun 2020-2022	69
Gambar 3.3	: Pelayanan Penderita Diabetes Mellitus Tahun 2020-2022	70
Gambar 3.4	: Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2020-2022	70
Gambar 3.5	: Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV/Aids Kota Sawahlunto Tahun 2020-2022	72
Gambar 3.6	: Kasus KIV/Aids Kota Sawahlunto Per Kecamatan Dari Tahun 2022-2022	73
Gambar 3.7	: Kasus HIV Aids Kota Sawahlunto berdasarkan Jenis Kelamin dari tahun 2002 sd 2022	73
Gambar 4.1	: Cascading Kinerja Perangkat Daerah	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan berwawasan kesehatan yang berkesinambungan atau *Health in All Policies (HiAPs)*, di mana seluruh komponen bangsa mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota masyarakat, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun profesi. Seluruh pembangunan sektoral harus mempertimbangkan kontribusi dan dampaknya terhadap kesehatan.

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir diantaranya : 1). Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, 3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, 7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020- 2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, serta mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, BKKBN berperan dalam 3 (tiga) Program Prioritas (PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP: (1)Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan (2)Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP: Kesejahteraan Sosial
- 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP: (1)Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan (2)Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

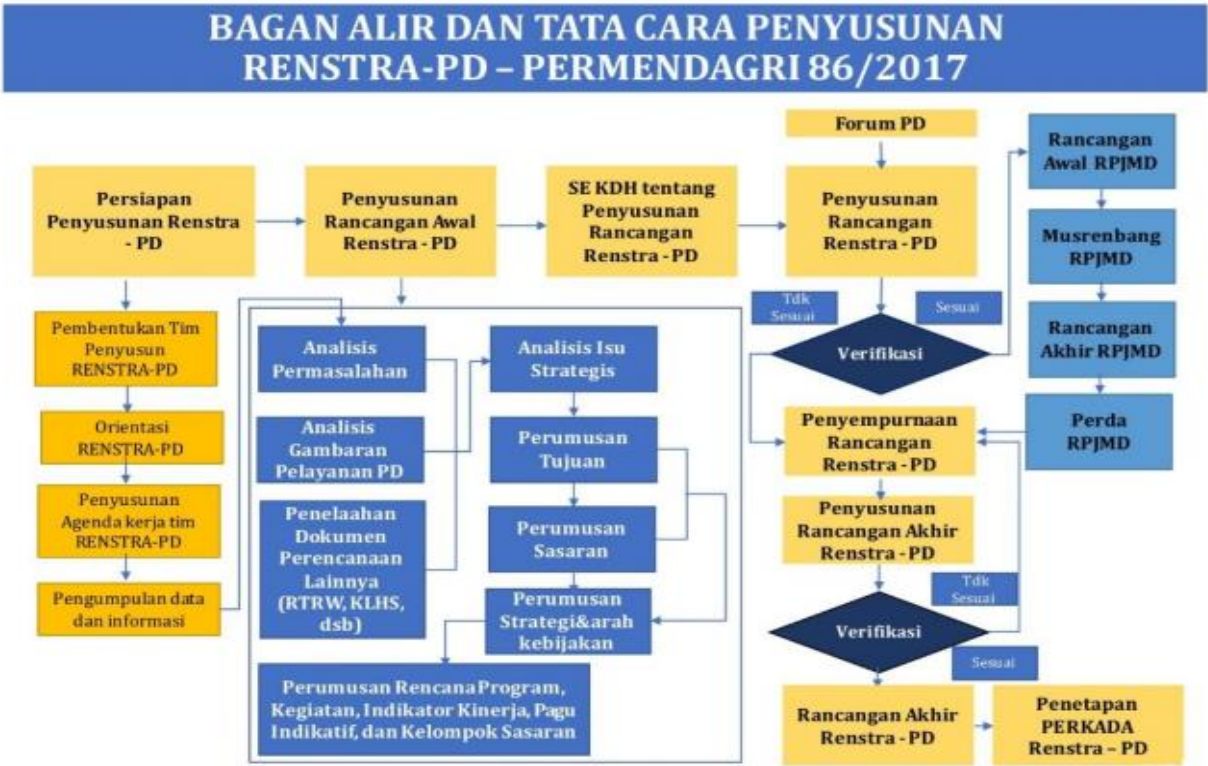
Perencanaan pembangunan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat (22) mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah.

Proses penyusunan renstra perangkat daerah menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16 ayat 2 terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu : 1) persiapan penyusunan renstra meliputi penyusunan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun renstra perangkat daerah orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; 2) Penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah yang meliputi analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah, perumusan rencana program ,kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan perangkat daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD; 3) Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara untuk menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan sistematika Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD; 4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi

rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sama dengan Rancangan Awal dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; 6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah atau Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Penyusunan Rencana Strategis ini berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen peencanaan tahunan yaitu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ini tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja perangkat daerah.

1.1.1 Hubungan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib mengacu kepada Dokumen RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Keterkaitan antara Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB dengan RPD Kota Sawahlunto salah satu melalui perumusan prioritas pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tentu perlu memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan melalui pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Isu strategis pembangunan daerah yang menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang diantaranya Pembangunan Manusia. Dalam memaksimalkan capaian kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat perlu dukungan dari Pemerintah Kota Sawahlunto sesuai dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan.

1.1.2 Hubungan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Renstra Kementerian/Lembaga

Renstra Kementerian/ lembaga yang mendukung Visi Presiden yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia yang selaras dengan Tujuan RPD Pemerintah Kota Sawahlunto yaitu Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter yang dilandasi agama dan budaya. Dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Dalam renstra kementerian kesehatan tahun 2020-2024 salah satu arah kebijakan bidang kesehatan yang tertuang didalam RPJMN tahun 2020-2024 yaitu “meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan sistem pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

Untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang menjadi sasaran didalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 sejalan dengan lima strategi kesehatan nasional yaitu ; 1) meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi, 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, 3) peningkatan pengendalian penyakit, 4) Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, 5) penguatan sistem kesehatan.

1.1.3 Hubungan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Renstra Provinsi Sumatera Barat

Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaras dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih maka visi pembangun jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”, dengan misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. Sejalan dengan tujuan Dinas Kesehatan provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya kesehatan ibu, anak dan kesehatan masyarakat, meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat serta meningkatnya kepesertaan jaminan kesehatan. Visi perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat “Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Salah satu indikator kinerja utama BKKBN perwakilan provinsi Sumatera Barat yaitu Angka kelahiran total, Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) serta persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang nomor 52 Tahun 2010 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di provinsi Sumatera barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Kerja Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
 16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
 17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85); yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 95);
 18. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 77 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tat kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 19. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 20. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun untuk menyamakan komitmen dalam rangka mendorong kinerja jajaran kesehatan, keluarga berencana dan peran serta masyarakat serta lintas sektor terkait untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota serta menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas kota sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk

memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 adalah :

- 1) Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bagi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 2) Sebagai pedoman bagi jajaran seluruh bagian di lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Sawahlunto dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang memuat program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024-2026, hubungan antara dokumen RPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, serta sistematika penulisan dokumen RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui renstra perangkat daerah tahun terakhir, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD dua tahun terakhir (2021-2022)

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat permasalahan pembangunan daerah berdasarkan kondisi daerah dan capaian kinerja daerah pada bab II yang mencakup empat aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum termasuk SPM dan isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran dari penyusunan dokumen RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 berdasarkan visi misi RPJPD Kota Sawahlunto

Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan analisa kebijakan RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dan isu strategis aktual serta cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome dan indikator masing-masing.

BAB V STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 serta penentuan program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 sesuai cascading di BAB IV.

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan seluruh program Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan daftar program Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penentuan target penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2024-2026 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah (IKD).

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto No.77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terdiri dari

1. Kepala Dinas
2. 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) sub bagian
3. 3 (tiga) Bidang dan 2 (dua) bidang terdiri dari 3 (tiga) sub koordinator dan 1 (satu) bidang terdiri dari 2 (dua) koordinator.

2.1.1 Tugas Fungsi

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto mempunyai tugas membantu Walikota memimpin, merencanakan, merumuskan kebijakan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

2.1.2.1 Kepala Dinas

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), sumber daya kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta penanggulangan gawat darurat terpadu (PSC 119);
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), sumber daya kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta penanggulangan gawat darurat terpadu (PSC 119);
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), sumber daya kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta penanggulangan gawat darurat terpadu (PSC 119);
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi dan disiplin kerja;
- f. Pembinaan UPTD dan institusi/lembaga lainnya di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberikan arahan sesuai bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.2.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Tugas Pokok sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan proses perizinan dan pelayanan umum urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Penyelenggaraan kebijakan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pengorganisasian penyusunan kebutuhan tenaga dan peningkatan kompetensi tenaga;
- e. Pengorganisasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- f. Pengorganisasian dan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan lingkungan Dinas;
- h. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2.1 Sub Bagian Administrasi umum dan Kepegawaian

Tugas pokok Sub Bagian Administrasi umum dan Kepegawaian menyelenggarakan, memelihara dan mengendalikan administrasi kesekretariatan, inventaris, perlengkapan rumah tangga Dinas serta administrasi kepegawaian. Serta menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, dan aset;
- c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
- d. Pemetaan dan fasilitas peningkatan kompetensi tenaga Dinas;
- e. Penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggung jawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama bendahara barang;
- f. Pengelolaan proses perizinan tenaga kesehatan;
- g. Penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian;
- h. Pelaksanaan evaluasi yang berada dibawah Sub Bagian administrasi Umum dan Kepegawaian;
- i. Penyusunan laporan tahunan Sub Bagian administrasi Umum dan Kepegawaian;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2.2 Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, pelaporan dan penatausahaan keuangan di lingkup Dinas. Serta menyelenggarakan fungsi yaitu ;

- a. Penyusunan perencanaan Dinas;

- b. Penyusunan laporan tahunan Dinas;
- c. Penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
- d. Penyusunan laporan pertanggung jawaban Pemerintah Daerah Dinas;
- e. Penyusunan profil kesehatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi program/kegiatan dan keuangan Dinas;
- g. Pelaksanaan sistem informasi kesehatan;
- h. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis program dan keuangan serta pelaporan ke puskesmas dan jaringannya;
- i. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan barang Dinas
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3 Bidang Kesehatan Masyarakat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Serta menyelenggarakan fungsinya ;

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervise dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, serta menyelenggarakan fungsinya :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat

- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kesehatan keluarag dan gizi masyarakat
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpoinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga

Tugas pokok menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, dengan menyelenggarakan fungsinya :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta peamntauan, evaluasi dan pelaporan program pencegahan dan pengendalian penyakit yang terdiri dari surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa, serta menyelenggarakan fungsinya yaitu :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional program pencegahan dan pengendalian penyakit yang terdiri dari surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional program pencegahan dan pengendalian penyakit yang terdiri dari surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi program pencegahan dan pengendalian penyakit yang terdiri dari surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pencegahan dan pengendalian penyakit yang terdiri dari surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpoinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.4 Bidang Pelayanan Promosi dan Sumber Daya Kesehatan

Tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan Kesehatan primer dan pelayanan Kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pengelolaan jaminan Kesehatan, pelayanan Kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat Kesehatan, perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber daya manusia Kesehatan dan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (PSC 119). Serta menyelenggarakan fungsinya yaitu ;

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan Kesehatan primer dan pelayanan Kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pengelolaan jaminan Kesehatan, pelayanan Kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat Kesehatan, perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber daya manusia Kesehatan dan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (PSC 119);
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan Kesehatan primer dan pelayanan Kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pengelolaan jaminan Kesehatan, pelayanan Kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat Kesehatan, perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber daya manusia Kesehatan dan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (PSC 119);
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan Kesehatan primer dan pelayanan Kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pengelolaan jaminan Kesehatan, pelayanan Kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat Kesehatan, perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber daya manusia Kesehatan dan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (PSC 119);
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan Kesehatan primer dan pelayanan Kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pengelolaan jaminan Kesehatan, pelayanan Kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat Kesehatan, perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber daya manusia Kesehatan dan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (PSC 119).
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.4.1 Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi Pelayanan Kesehatan
Tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelayanan Kesehatan serta sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (PSC 119), serta menyelenggarakan fungsinya :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional pelayanan Kesehatan dan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (PSC 119);
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional pelayanan Kesehatan dan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (PSC 119);
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan Kesehatan dan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (PSC 119);

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan Kesehatan dan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (PSC 119).
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpoinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.4.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Kefarmasian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kefarmasian, alat Kesehatan, dan perbekalan Kesehatan rumah tangga (PKRT). Serta menyelenggarakan fungsinya :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional kefarmasian, alat Kesehatan, dan perbekalan Kesehatan rumah tangga (PKRT);
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional kefarmasian, alat Kesehatan, dan perbekalan Kesehatan rumah tangga (PKRT);
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional kefarmasian, alat Kesehatan, dan perbekalan Kesehatan rumah tangga (PKRT);
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kefarmasian, alat Kesehatan, dan perbekalan Kesehatan rumah tangga (PKRT);
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpoinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.4.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Promosi Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan program promosi pemberdayaan masyarakat dan sumber Daya manusia Kesehatan, serta menyelenggarakan fungsinya yaitu :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional program promosi pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia Kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional program promosi pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia Kesehatan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi program promosi pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia Kesehatan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program promosi pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia Kesehatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpoinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.5 **Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarag berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Serta menyelenggarakan fungsinya yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga’
- c. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

- e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan berencana dan kader keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-kb, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.5.1 Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

Tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, serta menyelenggarakan fungsinya yaitu ;

- a. Penyelenggaraan kegiatan teknis pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- d. Penyelenggaraan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;
- g. Pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Pengorganisasian pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.5.2 Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta menyelenggarakan fungsinya yaitu ;

- a. Penyelenggaraan kegiatan teknis keluarga berencana dan kegiatan teknis, kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Penyelenggaraan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Penyelenggaraan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- d. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- e. Penyelenggaraan pembinaan kesertaan ber keluarga berencana;
- f. Penyelenggaraan kegiatan bina keluarga balita;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketahanan remaja
- h. Penyelenggaraan kegiatan bina keluarga lansia dan rentan;
- i. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keuangan;
- j. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kegiatan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan fasilitas kegiatan keluarga berencana, kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- l. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.6 UPTD

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto mempunyai tujuh (7) UPTD diantaranya enam (6) Puskesmas, satu (1) RSUD dan satu (1) Instalasi Farmasi Kota.

2.1.3 Struktur Organisasi

Unsur-unsur organisasi pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Lingkungan , Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Kesehatan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dan SDK
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakkan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- a. UPTD Puskesmas Talawi, Kolok, Sungai Durian, Kampung Teleng, Lunto, Silungkang, dan Instalasi Farmasi Kota.
- b. UPTD Khusus RSUD Kota Sawahlunto

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Direktur

Direktur adalah Kepala UPTD RSUD Sawahlunto. Direktur mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan di UPTD RSUD Sawahlunto, memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait Tata Usaha, Pelayanan Kesehatan, Penunjang serta Perencanaan dan Pengembangan RS sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.

2) Kepala Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian, bertanggung jawab kepada Direktur, mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan program kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dokumen administrasi, menyusun rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit, menyelenggarakan kegiatan hukum menyangkut Rumah sakit, pendidikan dan pelatihan pegawai serta tugas-tugas umum Rumah Sakit Umum Daerah.

Kepala Bagian Tata Usaha Membawahi 3 Kepala Sub bagian:

a) Sub Bagian Administrasi Umum

Sub Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan, menyusun rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

b) Sub Bagian Administrasi Keuangan

Sub Bagian Administrasi Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah.

c) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola semua urusan kepegawaian dan pengembangan SDM Rumah Sakit Umum Daerah.

3) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan RS

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Rumah Sakit dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan Rumah Sakit.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Rumah Sakit Membawahi 2 seksi yaitu:

a) Seksi Perencanaan dan Pelaporan

Seksi Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan perencanaan penyusunan program, sistem informasi dan pelaporan serta pengembangan Rumah Sakit.

b) Seksi Pemasaran dan Humas

Seksi Pemasaran dan Humas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pemasaran, protokol dan humas Rumah Sakit.

4) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan kegiatan pelayanan medik, pelayanan di rumah sakit.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi 2 seksi yaitu:

a) Seksi Pelayanan Medis

Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, fasilitasi pelayanan medis, pengendalian mutu pelayanan medis, penerimaan dan pemulangan pasien pada rawat inap maupun rawat jalan rumah sakit.

b) Seksi Keperawatan

Seksi Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan kegiatan asuhan pelayanan keperawatan, fasilitasi pelayanan keperawatan dan pengendalian mutu pelayanan keperawatan rumah sakit.

5) Kepala Bidang Penunjang

Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur mempunyai tugas pokok mengelola urusan kefarmasian, alat kesehatan, alat medis, laboratorium dan penunjang medis lainnya serta pencatatan dan pelaporan rekam medis di Rumah Sakit.

Kepala Bidang Penunjang membawahi 2 Seksi yaitu:

a) Kepala Seksi Penunjang Medis

Seksi Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang, mempunyai tugas pokok mengelola urusan kefarmasian, alat kesehatan, alat medis, laboratorium dan penunjang medis lainnya di Rumah Sakit.

b) Kepala Seksi Penunjang Non Medis

Seksi Penunjang Non Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang, mempunyai tugas pokok mengelola urusan penunjang non medis lainnya di Rumah Sakit.

Selain struktur diatas, terdapat struktur lain yang membantu manajemen dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi rumah sakit, yaitu :

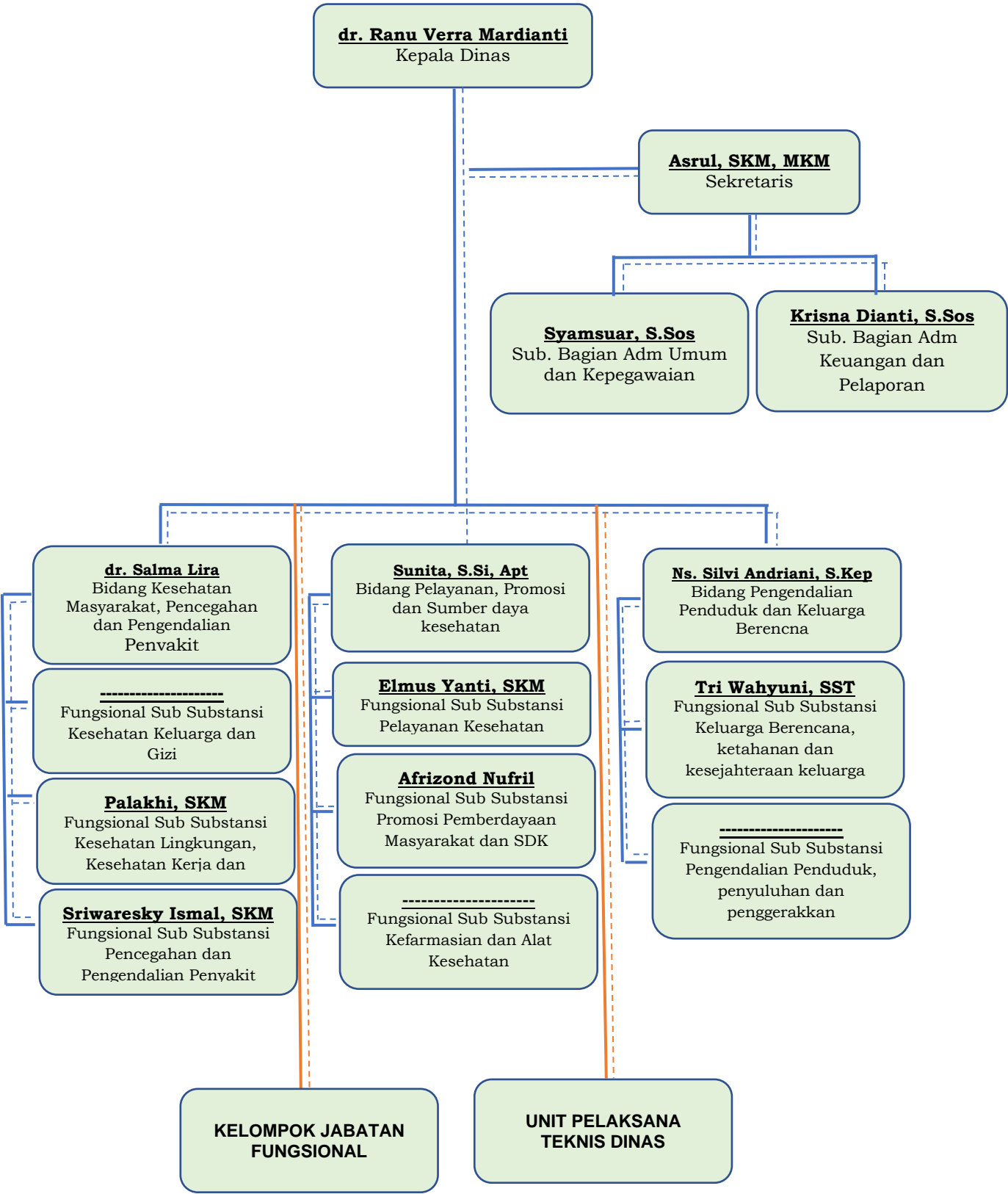
- 1. Komite Rumah Sakit
- 2. Instalasi/ ruangan

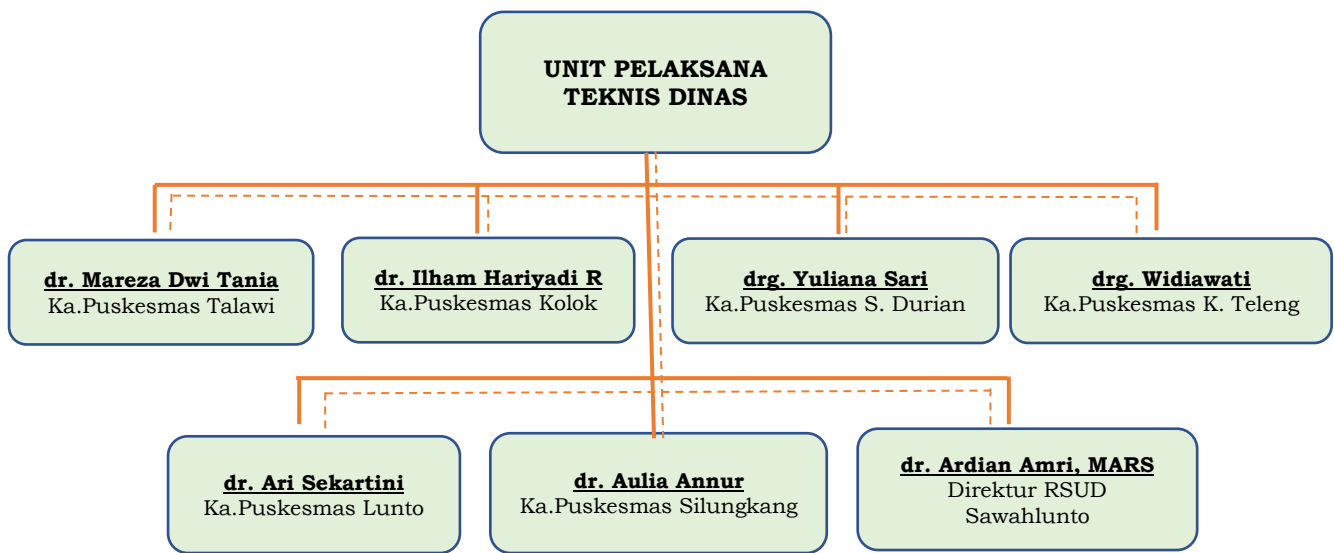
Gambar 2.1
Struktur Organisasi BLUD RSUD Kota Sawahlunto



Sumber : Perwako Nomor 1 Tahun 2021

Gambar 2.2
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA





Sumber : Perwako Kota Sawahlunto No. 77 Tahun 2021

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah dan Komposisi Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kepegawaian Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto Tahun 2022

No	Pendidikan	Jumlah	Jabatan			PPPK	Non PNS	NS	BLUD
			Struktural	Fungsional					
				Umum	tertentu				
1.	Kedokteran Spesialis Paru	1	0	0	1	0	0	0	0
2.	Kedokteran Spesialis Anak	3	0	0	3	0	0	0	0
3.	Kedokteran Spesialis Penyakit Dalam	2	0	0	2	0	0	0	0
4.	Kedokteran Spesialis Ilmu Penyakit Mata	1	0	0	1	0	0	0	0
5.	Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	1	0	0	1	0	0	0	0
6.	Kedokteran Spesialis Bedah	1	0	0	1	0	0	0	0
7.	Kedokteran Spesialis Ilmu Kebidanan & Penyakit Kandungan	1	0	0	1	0	0	0	0
8.	Kedokteran Spesialis Dermatologi dan Venereologi	1	0	0	1	0	0	0	0

No	Pendidikan	Jumlah	Jabatan			PPPK	Non PNS	NS	BLUD
			Struktural	Fungsional					
				Umum	tertentu				
9.	Kedokteran Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1	0	0	1	0	0	0	0
10.	Kedokteran Spesialis Ilmu Radiologi	1	0	0	1	0	0	0	0
11.	S2 Kesehatan Masyarakat	2	1	1	0	0	0	0	0
12.	S1 Dokter Umum	31	2	0	20	0	7	2	0
13.	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	0	0	1	0	0	0	0
14.	Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut	1	0	0	1	0	0	0	0
15.	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maxilofasial	1	0	0	1	0	0	0	0
16.	S1 Dokter Gigi	10	0	0	7	0	2	1	0
17.	S2 Keperawatan	1	0	0	1	0	0	0	0
18.	S2 Keperawatan Spesialis Keperawatan Anak	1	0	0	1	0	0	0	0
19.	Perawat								
	SPK	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIII Keperawatan	142	0	3	80	3	37	1	18
	DIV Keperawatan	0	0	0	0	0	0	0	
	S1 Keperawatan/ Nurse	95	3	3	57	0	23	0	9
	DIII Anaestasi	7	0	0	7	0	0	0	0
20.	Perawat Gigi								
	SPRG	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIII AMKG	13	0	0	7	2	3	0	1
21.	Bidan								
	DIII Kebidanan	115	0	1	51	11	47	0	5
	DIV Kebidanan	48	0	3	35	0	9	0	1
	S1 Kebidanan	1	0	0	0	0	1	0	0
22.	Kefarmasian								
	SAA	2	0	0	2	0	0	0	0
	DIII Farmasi	28	0	0	22	1	0	0	5
	S1 Farmasi	2	0	0	0	0	2	0	
	Profesi Apoteker	20	1	0	14	2	2	0	1
23.	Kesehatan Masyarakat								
	S2 Kesmas	2	0	2	0	0	0	0	0
	S1 Kesmas / SKM	36	2	6	15	1	9	1	2

No	Pendidikan	Jumlah	Jabatan			PPPK	Non PNS	NS	BLUD
			Struktural	Fungsional					
				Umum	tertentu				
	DIII Managemen RS	2	0	1	0	0	0	0	1
24.	Sanitarian								
	SPPH	1	0	0	1	0	0	0	0
	DIII Kesling	12	0	0	8	0	0	3	1
	DIV Kesling	5	0	0	3	0	1	1	0
	S1 Kesling	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Nutrisionis								
	DIII Gizi	16	0	0	10	0	3	2	1
	DIV Gizi	0	0	0	0	0	0	0	0
	S1 Gizi	11	2	0	8	0	0	0	1
26.	Keterapian Fisik								
	DIII Fisio Terapi	11	0	0	6	0	4	0	1
	S1 Fisioterapi	2	0	0	2	0	0	0	0
27.	Keteknisian Medis								
	DIII Elektro Medis	3	0	0	3	0	0	0	0
	D III Refraksionis Optisen	2	0	0	2	0	0	0	0
	DIII Rekam Medis	22	0	0	17	0	0	0	5
	DIII Radiografer	9	0	0	7	0	0	0	2
	DIII Analis Kesehatan	18	0	0	15	0	2	0	1
	DIV Analis Kesehatan	6	0	0	3	0	1	1	1
	S2 Manajemen RS	1	0	1	0	0	0	0	0
28.	Non Kesehatan								
	SD	9	0	2	0	0	2	0	5
	SLTP	16	0	3	0	0	7	0	6
	SLTA	142	0	18	0	0	45	0	79
	Pekarya Kesehatan	1	0	1	0	0	0	0	0
	DI Umum	2	0	0	0	0	0	0	2
	DII Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIII Umum	5	0	1	0	0	1	0	3
	S1 Umum	36	3	14	0	0	14	0	5
	S2 Umum	2	0	2	0	0	0	0	0
	Total	906	14	62	420	20	222	12	156

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2022

Data sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Rumah Sakit Type C	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
2	Puskesmas Rawatan dengan Tempat Tidur	2
3	Puskesmas Non Rawatan	4
4	Gudang Farmasi	1
5	Puskesmas Pembantu	26
6	Pos Kesehatan Kelurahan/Desa	2
7	Polindes	5
8	Posyandu	103
9	Apotek	9
10	Optikal	4
11	Toko Obat	8
12	Laboratorium Klinik	-
13	Kendaraan Roda 4	41
14	Kendaraan Roda 2	148
15	Kendaraan Roda 3	1
15	Klinik	1

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana yang memiliki fungsi perumusan kebijakan bidang kesehatan, pengkoordinasian perumusan rencana strategis dan kebijakan teknis bidang kesehatan, pelaksanaan dan koordinasi pembangunan kesehatan , pembinaan dan pengendalian pembangunan kesehatan. Hal tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan selain ada pelayanan yang dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat, juga terdapat pelayanan yang tidak langsung dengan memberikan ”pelayanan” kepada unsur pimpinan, dan Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Sawahlunto. Berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan pada periode Renstra Perubahan 2021 - 2023 kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat digambarkan sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
Kota Sawahlunto

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN					
					2021			2022		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)				70,14	70,1	99,9	70,28	70,4	100,2
2	Jumlah Kasus Kematian Bayi				19	13	131.58	18	18	100,0
3	Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan				0	1	1	0	2	2
4	Persentase Balita Gizi Buruk				7,8	0,04	199.5	7,5	0,07	199.1
5	Jumlah Kasus Kematian Balita				0	16	16	0	23	23
6	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar				100	100	100,0	100	100	100,0
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan				100	100	100,0	100	100	100,0
8	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk				0,0015	0,0015	100,0	0,0014	0,0016	114,3

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN					
					2021			2022		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terkredetasi				Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama
10	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil				100	71,7	71,7	100	65,4	65,4
11	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan				100	79,9	79,9	100	73,9	73,9
12	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				100	83,7	83,7	100	77,8	77,8
13	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai Standar				77	74,6	96,9	78	86,9	111,4
14	Persentase Anak usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar				100	68,4	68,4	100	100	100,0
15	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skring Kesehatan sesuai Standar				100	49,8	49,8	100	40,4	40,4
16	Persentase warga Negara usia 60 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai Standar				70	44,5	63,6	71	51,7	72,8
17	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai Standar				100	7,95	8,0	100	23,7	23,7
18	Persentase penderita DM mendapatkan mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar				100	50,6	50,6	100	76,7	76,7

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN					
					2021			2022		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19	Persentase penderita ODGJ berat mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar				100	100	100,0	100	100	100,0
20	Persentase terduga TBC mendapatkan pelayan TBC sesuai Standar				100	26	26,0	100	41,3	41,3
21	Persentase orang dengan Resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayan deteksi dini HIV sesuai Standar				100	100	100,0	100	100	100,0
22	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita				6,1	6,1	100,0	3,78	5.6	51.85
23	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 Tahun				2,29	2	112,7	2,25	2,02	110,2
24	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate/mCPR)				67,78	71,92	106,1	68,55	70,46	102,8
25	Persentase Unmeet need (Kebutuhan Ber-KB yang belum terpenuhi)				15,97	10,87	68,1	14,6	11,99	82,1

Gambaran kondisi umum pembangunan kesehatan didapatkan dari hasil evaluasi Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Sawahlunto periode 2018-2023, dari 25 indikator kinerja pelayanan ada beberapa indikator yang menjadi masalah yaitu :

1. Pada indikator jumlah kasus kematian bayi adanya kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 13 orang dari target 19 orang sementara tahun 2022 dari target 18 orang didapatkan kematian bayi sebanyak 18 orang atau sekitar 100%. Permasalahan yang dihadapi masih ada fasilitas pelayanan Kesehatan yang dalam kondisi rusak sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak optimal dan membuat masyarakat tidak nyaman untuk berkunjung, serta ketersediaan alat Kesehatan sesuai standar yang harus dimiliki oleh puskesmas pembantu dan jaringannya yang belum memadai, serta ketersediaan tenaga yang belum mencukupi serta perilaku masyarakat yang terkadang enggan untuk memeriksakan kehamilannya ke fasilitas pelayanan Kesehatan, sehingga kadang luput dari pantauan tenaga Kesehatan. Diperparah oleh kondisi ibu hamil yang mempunyai resiko selama masa kehamilan dan ini yang akan menyebabkan terjadinya komplikasi selama kehamilan.
2. Indikator kinerja pelayanan jumlah kasus kematian ibu melahirkan serta jumlah kasus kematian balita yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021. Perlunya kesadaran serta perubahan paradigma masyarakat pentingnya untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan ke fasilitas Kesehatan untuk meminimal kasus kematian pada ibu melahirkan dan balita.
3. Indikator kinerja pelayanan standar pelayanan minimal (SPM) masih ada yang belum tercapai 100% seperti pada indikator orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining Kesehatan baru 40,4%, warga negara usia 60 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 51.7%, penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 23.7%, orang yang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 41.3%, hal ini disebabkan masih belum terlayannya semua warga negara usia 15-59 tahun karena masih ada masyarakat yang malas untuk sekedar memeriksakan Kesehatan ke fasilitas Kesehatan, dan disaat tenaga Kesehatan melakukan kunjungan rumah untuk melakukan penjangkaran masyarakat tidak berada dirumah karena melakukan aktivitas diluar rumah seperti keladang, sawah dll. Masih ada penderita hipertensi yang tidak meminum obat secara teratur dan memeriksakan Kesehatan secara berkala untuk memantau tekanan darah, serta masih ada ditemukan masyarakat yang batuk sudah lebih dari 3 hari tidak mau memeriksakan Kesehatan ke fasilitas Kesehatan.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pendapatan											
A. Retribusi Pasien Umum	359.336.630	395.270.293		293.176.700	361.041.700	-	81,6	91,3	0,0	10,0%	23,1%
1. Puskesmas Talawi	204.000.000	224.400.000	-	153.248.300	183.627.900	-	75,1	81,8	0,0	10,0%	19,8%
2. Puskesmas Kolok	24.000.000	26.400.000	-	18.833.300	20.943.800	-	78,5	79,3	0,0	10,0%	11,2%
3. Puskesmas Sei. Durian	19.836.630	21.820.293	-	26.752.000	46.810.100	-	134,9	214,5	0,0	10,0%	75,0%
4. Puskesmas K. Teleng	24.000.000	26.400.000	-	21.072.000	18.692.100	-	87,8	70,8	0,0	10,0%	-11,3%
5. Puskesmas Lunto	7.500.000	8.250.000	-	9.233.000	10.863.000	-	123,1	131,7	0,0	10,0%	17,7%
6. Puskesmas Silungkang	80.000.000	88.000.000	-	64.038.100	80.104.800	-	80,0	91,0	0,0	10,0%	25,1%
B. Kapitasi Puskesmas	2.619.596.833	3.270.243.404		2.588.802.850	2.620.196.134	-	98,8	80,1	0,0	24,8%	1,2%
1. Puskesmas Talawi	866.308.482	1.268.436.555	-	866.295.600	855.066.211	-	100,0	67,4	0,0	46,4%	-1,3%
2. Puskesmas Kolok	282.257.328	301.048.730	-	277.768.950	299.204.161	-	98,4	99,4	0,0	6,7%	7,7%
3. Puskesmas Sei. Durian	459.040.360	453.374.201	-	412.609.800	408.179.841	-	89,9	90,0	0,0	-1,2%	-1,1%
4. Puskesmas K. Teleng	307.357.349	384.776.963	-	307.422.900	331.762.947	-	100,0	86,2	0,0	25,2%	7,9%
5. Puskesmas Lunto	242.823.966	281.138.609	-	262.929.100	263.061.433	-	108,3	93,6	0,0	15,8%	0,1%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6. Puskesmas Silungkang	461.809.348	581.468.346	-	461.776.500	462.921.541	-	100,0	79,6	0,0	25,9%	0,2%
C. BLUD	-	1.091.002.000	4.959.185.536	-	998.087.835	5.227.213.897	-	91,5	105,4	0,0%	0,0%
1. Puskesmas Talawi	-	382.546.743	1.628.000.000	-	340.478.653	1.717.358.517	-	89,0	105,5	0,0%	0,0%
2. Puskesmas Kolok	-	112.666.946	498.925.000	-	109.449.917	549.117.186	-	97,1	110,1	0,0%	0,0%
3. Puskesmas Sei. Durian	-	178.581.101	819.811.714	-	154.415.725	830.785.094	-	86,5	101,3	0,0%	0,0%
4. Puskesmas K. Teleng	-	129.533.522	647.377.754	-	118.764.436	656.704.422	-	91,7	101,4	0,0%	0,0%
5. Puskesmas Lunto	-	97.018.004	448.915.068	-	91.640.185	463.562.232	-	94,5	103,3	0,0%	0,0%
6. Puskesmas Silungkang	-	190.655.684	916.156.000	-	183.338.919	1.009.686.446	-	96,2	110,2	0,0%	0,0%
Belanja Daerah	70.489.214.898	58.262.364.651	61.538.181.717	61.218.266.818	56.583.274.961	47.068.887.769	86,8	97,1	76,5	-17,3%	-7,6%
Belanja Operasi	66.488.505.111	56.450.571.227	60.900.669.976	57.875.102.123	53.866.718.702	46.701.494.009	87,0	95,4	76,7	-15,1%	-6,9%
Belanja Modal	4.000.709.787	3.389.466.650	637.511.741	3.337.318.198	2.716.556.259	367.393.760	83,4	80,1	57,6	-15,3%	-18,6%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.920.281.448	32.179.846.854	33.668.426.609	27.843.061.472	31.261.773.646	31.880.955.837	96,3	97,1	94,7	11,3%	12,3%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.969.280.677	26.752.332.812	29.491.308.373	26.005.465.979	26.012.557.991	27.801.330.475	96,4	97,2	94,3	-0,8%	0,0%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.969.280.677	26.752.332.812	29.484.807.973	26.005.465.979	26.012.557.991	27.794.830.315	96,4	97,2	94,3	-0,8%	0,0%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	6.500.400			6.500.160			100,0		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.821.200	311.375.000	278.358.500	382.305.296	306.793.323	247.105.132	90,6	98,5	88,8	-26,2%	-19,8%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.525.000	12.824.000	12.285.000	5.692.900	12.304.350	12.221.100	75,7	95,9	99,5	70,4%	116,1%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249.765.200	90.437.500	61.967.500	243.312.136	90.301.830	61.701.550	97,4	99,8	99,6	-63,8%	-62,9%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.476.000	20.243.500	11.720.000	17.361.275	17.150.800	8.140.640	65,6	84,7	69,5	-23,5%	-1,2%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.000.000	22.000.000	21.686.000	20.921.990	21.996.324	21.682.674	99,6	100,0	100,0	4,8%	5,1%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.270.000	-	-	1.650.000	-	-	50,5	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.785.000	165.870.000	170.700.000	93.366.995	165.040.019	143.359.168	82,1	99,5	84,0	45,8%	76,8%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.900.000	-	50.000.000	32.670.000	-	49.880.000	99,3	0,0	99,8	-100,0%	-100,0%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	-	-	19.800.000	-	-	99,0	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.900.000	-	50.000.000	12.870.000	-	49.880.000	99,8	0,0	99,8	-100,0%	-100,0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.921.221	3.820.973.092	3.048.909.736	222.641.617	3.664.101.717	2.989.749.430	94,4	95,9	98,1	1519,6%	1545,7%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72.345.000	1.649.700	1.640.000	70.334.016	1.350.000	1.494.000	97,2	81,8	91,1	-97,7%	-98,1%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.576.221	184.973.392	198.419.736	152.307.601	177.130.717	161.113.830	93,1	95,8	81,2	13,1%	16,3%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	3.634.350.000	2.848.850.000	-	3.485.621.000	2.827.141.600	0,0	95,9	99,2	0,0%	0,0%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.260.358.350	1.295.165.950	799.850.000	1.199.978.580	1.278.320.615	792.890.800	95,2	98,7	99,1	2,8%	6,5%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	963.351.000	893.780.000	789.700.000	909.624.362	881.332.915	782.823.800	94,4	98,6	99,1	-7,2%	-3,1%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	220.000.000	-	-	218.603.350	-	-	99,4	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.007.350	401.385.950	10.150.000	71.750.868	396.987.700	10.067.000	93,2	98,9	99,2	421,2%	453,3%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	22.535.230.276	15.518.080.351	14.912.864.056	18.943.890.059	14.935.667.890	12.586.598.139	84,1	96,2	84,4	-31,1%	-21,2%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.554.750.205	1.318.283.105	834.068.977	2.104.239.348	1.113.625.590	606.582.371	82,4	84,5	72,7	-48,4%	-47,1%
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	740.729.645	-		617.421.000	-	-	83,4	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
Pengembangan Puskesmas	-	-		-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			200.000.000			198.609.000			99,3		
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	40.850.000	-		16.750.000	-	-	41,0	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	904.556.160	-	585.654.927	879.704.000	-	-	97,3	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	720.839.400	1.274.735.750		585.458.098	1.087.843.960	378.213.841	81,2	85,3	0,0	76,8%	85,8%
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	90.000.000	-	23.811.550	-	-	6.484.500	0,0	0,0	27,2	-100,0%	0,0%
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	57.775.000	43.547.355	24.602.500	4.906.250	25.781.630	23.275.030	8,5	59,2	94,6	-24,6%	425,5%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.759.640.521	14.014.236.096	14.037.632.729	16.645.652.825	13.638.856.035	11.950.963.463	84,2	97,3	85,1	-29,1%	-18,1%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	60.922.000	66.206.000	51.186.050	15.265.374	19.150.640	2.726.100	25,1	28,9	5,3	8,7%	25,5%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	91.680.000	75.683.799	19.976.250	33.156.753	69.580.300	7.373.850	36,2	91,9	36,9	-17,4%	109,9%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	51.967.000	73.424.500	106.422.600	48.970.260	69.004.060	26.924.400	94,2	94,0	25,3	41,3%	40,9%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	54.348.500	28.372.000	67.350.000	27.634.846	14.912.430	21.519.400	50,8	52,6	32,0	-47,8%	-46,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.846.980	42.931.750	7.750.250	35.802.800	38.287.150	7.731.150	99,9	89,2	99,8	19,8%	6,9%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	43.310.700	42.441.650	-	9.325.000	24.091.600	-	21,5	56,8	0,0	-2,0%	158,4%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	68.284.720	82.885.000	-	37.607.200	82.390.000	0,0	55,1	99,4	0,0%	0,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4.534.250	16.587.500	4.999.900	-	15.112.500	-	0,0	91,1	0,0	265,8%	0,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.062.000	9.000.000	4.900.000	-	2.205.500	-	0,0	24,5	0,0	121,6%	0,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.870.650	4.600.000	4.999.900	-	3.252.000	-	0,0	70,7	0,0	-21,6%	0,0%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	74.445.000	48.440.000	23.578.000	44.730.000	39.600.000	23.305.956	60,1	81,8	98,8	-34,9%	-11,5%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	27.805.110	33.913.800	4.999.900	13.687.740	30.258.100	-	49,2	89,2	0,0	22,0%	121,1%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	636.929.050	248.086.700	7.634.175	324.250.115	169.066.560	7.492.250	50,9	68,1	98,1	-61,0%	-47,9%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.735.166.942	-	97.201.864	2.412.866.028	-	66.103.050	64,6	0,0	68,0	-100,0%	-100,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	161.770.000	335.001.500	22.500.000	91.321.067	212.048.045	11.350.000	56,5	63,3	50,4	107,1%	132,2%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	8.867.250	3.276.900	-	8.739.650	3.259.700	0,0	98,6	99,5	0,0%	0,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	87.932.000	140.486.877	153.780.000	69.483.456	113.479.750	97.188.200	79,0	80,8	63,2	59,8%	63,3%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	133.980.000	62.863.000	-	69.061.750	43.427.120	-	51,5	69,1	0,0	-53,1%	-37,1%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	19.328.000	-	1.900.000	7.793.900	-	620.000	40,3	0,0	32,6	-100,0%	-100,0%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	193.117.950	86.005.000	51.056.500	49.188.000	76.064.100	246.250	25,5	88,4	0,5	-55,5%	54,6%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3.654.300	10.499.750	624.000	-	9.777.000	621.000	0,0	93,1	99,5	187,3%	0,0%
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	54.848.000	20.000.000	10.878.000	23.515.850	18.797.600	-	42,9	94,0	0,0	-63,5%	-20,1%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	224.505.777	119.480.000	305.361.630	120.094.606	80.054.560	64.169.900	53,5	67,0	21,0	-46,8%	-33,3%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.884.141.200	12.092.547.450	12.311.600.110	11.792.785.428	12.038.020.730	10.822.455.814	99,2	99,5	87,9	1,8%	2,1%
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	113.043.000	85.000.000	-	86.372.731	73.201.350	-	76,4	86,1	0,0	-24,8%	-15,2%
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.670.483.112	120.392.850	673.503.000	1.249.010.871	113.792.040	419.406.640	74,8	94,5	62,3	-92,8%	-90,9%
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	372.569.000	144.720.000	-	109.906.250	-	-	29,5	0,0	0,0	-61,2%	-100,0%
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	13.380.000	30.400.000	19.268.700	11.430.000	24.422.450	-	85,4	80,3	0,0	127,2%	113,7%
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-	243.136.700	302.031.560	-	242.120.240	284.735.803	0,0	99,6	94,3	0,0%	0,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	57.790.000	1.999.800	-	52.783.360	1.344.000	0,0	91,3	67,2	0,0%	0,0%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	148.110.550	79.624.000	19.860.000	146.020.230	79.105.420	19.732.305	98,6	99,3	99,4	-46,2%	-45,8%
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	112.233.800	31.624.000	16.900.000	110.344.524	31.315.120	16.792.705	98,3	99,0	99,4	-71,8%	-71,6%
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	35.876.750	48.000.000	2.960.000	35.675.706	47.790.300	2.939.600	99,4	99,6	99,3	33,8%	34,0%
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72.729.000	105.937.150	21.302.350	47.977.656	104.080.845	9.320.000	66,0	98,2	43,8	45,7%	116,9%
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	9.729.000	84.503.250	20.549.050	8.500.700	82.831.345	8.586.000	87,4	98,0	41,8	768,6%	874,4%
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	63.000.000	21.433.900	753.300	39.476.956	21.249.500	734.000	62,7	99,1	97,4	-66,0%	-46,2%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.093.900.000	-	2.200.000	401.597.680	-	1.550.000	36,7	0,0	70,5	-100,0%	-100,0%
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	260.000			248.400			95,5		
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-	-	260.000			248.400			95,5		
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	309.950.000	-	2.200.000	298.849.080	-	1.550.000	96,4	0,0	70,5	-100,0%	-100,0%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	300.000.000	-	-	296.428.580	-		98,8	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.950.000	-	2.200.000	2.420.500	-	1.550.000	24,3	0,0	70,5	-100,0%	-100,0%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	783.950.000	-	-	102.748.600	-	-	13,1	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	783.950.000	-	-	102.748.600	-	-	13,1	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	250.016.000	19.742.600	377.153.700	121.223.200	13.485.480	259.608.163	48,5	68,3	68,8	-92,1%	-88,9%
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan	4.106.250	-	843.000	2.294.750	-	145.750	55,9	0,0	17,3	-100,0%	-100,0%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)											
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4.106.250	-	843.000	2.294.750	-	145.750	55,9	0,0	17,3	-100,0%	-100,0%
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	6.889.500	4.497.950	2.253.700	150.000	1.712.000	-	2,2	38,1	0,0	-34,7%	1041,3%
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	6.889.500	4.497.950	2.253.700	150.000	1.712.000	-	2,2	38,1	0,0	-34,7%	1041,3%
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	121.934.250	4.668.400	134.850.000	95.126.500	3.702.980	94.577.058	78,0	79,3	70,1	-96,2%	-96,1%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	121.934.250	4.668.400	134.850.000	95.126.500	3.702.980	94.577.058	78,0	79,3	70,1	-96,2%	-96,1%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24.050.000	-	1.520.000	18.463.600	-	1.195.000	76,8	0,0	78,6	-100,0%	-100,0%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24.050.000	-	1.520.000	18.463.600	-	1.195.000	76,8	0,0	78,6	-100,0%	-100,0%
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	3.261.000	7.469.250	76.304.000	2.901.350	6.195.500	56.932.255	89,0	82,9	74,6	129,0%	113,5%
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	3.261.000	7.469.250	76.304.000	2.901.350	6.195.500	56.932.255	89,0	82,9	74,6	129,0%	113,5%
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	89.775.000	3.107.000	161.383.000	2.287.000	1.875.000	106.758.100	2,5	60,3	66,2	-96,5%	-18,0%
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	89.775.000	3.107.000	161.383.000	2.287.000	1.875.000	106.758.100	2,5	60,3	66,2	-96,5%	-18,0%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	543.909.000	50.634.000	99.337.980	411.102.895	-	35.799.543	75,6	0,0	36,0	-90,7%	-100,0%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	286.104.000	9.000.000	38.908.000	200.390.250	-	21.458.840	70,0	0,0	55,2	-96,9%	-100,0%
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	286.104.000	9.000.000	38.908.000	200.390.250	-	21.458.840	70,0	0,0	55,2	-96,9%	-100,0%
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.040.000	21.634.000	6.800.000	79.287.100	-	6.790.703	71,4	0,0	99,9	-80,5%	-100,0%
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	111.040.000	21.634.000	6.800.000	79.287.100	-	6.790.703	71,4	0,0	99,9	-80,5%	-100,0%
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	146.765.000	20.000.000	53.629.980	131.425.545	-	7.550.000	89,5	0,0	14,1	-86,4%	-100,0%
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	146.765.000	20.000.000	53.629.980	131.425.545	-	7.550.000	89,5	0,0	14,1	-86,4%	-100,0%
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	40.999.000	153.165.000	120.000.000	36.360.506	144.549.264	16.023.800	88,7	94,4	13,4	273,6%	297,5%
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	72.900.000	-	-	71.611.000	-	0,0	98,2	0,0	0,0%	0,0%
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	-	72.900.000	-	-	71.611.000	-	0,0	98,2	0,0	0,0%	0,0%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	40.999.000	80.265.000	120.000.000	36.360.506	72.938.264	16.023.800	88,7	0,0	13,4	95,8%	100,6%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	-	64.200.000			39.831.336			62,0		
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		1.065.000		-	1.065.000	-	0,0	100,0	0,0	0,0%	0,0%
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	40.999.000	-	31.800.000	36.360.506	-	5.435.600	88,7	0,0	17,1	-100,0%	-100,0%
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		79.200.000	24.000.000	-	71.873.264	10.588.200	0,0	90,7	44,1	0,0%	0,0%
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.876.254.400	2.206.503.000	833.731.000	1.092.976.593	1.915.454.800	371.749.700	58,3	86,8	44,6	17,6%	75,3%
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.775.974.800	364.415.000	554.600.000	994.809.350	344.891.050	221.979.300	56,0	94,6	40,0	-79,5%	-65,3%
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	4.375.000	80.000.000	-	4.335.750	20.693.400	0,0	99,1	25,9	0,0%	0,0%
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	5.288.000	25.000.000	-	4.815.750	24.595.500	-	91,1	98,4	0,0	372,8%	410,7%
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	70.640.000	150.000.000	-	62.888.050	88.602.000	0,0	89,0	59,1	0,0%	0,0%
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	62.400.000	52.000.000	-	61.836.800	14.525.000	0,0	99,1	27,9	0,0%	0,0%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.770.686.800	162.000.000	192.600.000	989.993.600	157.466.950	80.035.900	55,9	97,2	41,6	-90,9%	-84,1%
Pengendalian Program KKBPK	-	40.000.000	80.000.000	-	33.768.000	18.123.000	0,0	84,4	22,7	0,0%	0,0%
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	89.175.000	177.600.000	78.000.000	87.068.243	164.938.800	4.539.900	97,6	92,9	5,8	99,2%	89,4%
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			4.000.000			-			0,0		
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	89.175.000	-	-	87.068.243	-	-	97,6	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
PenggerakanKader Institusi masyarakat Pedesaan (IMP)		177.600.000	74.000.000		164.938.800	4.539.900	0,0	92,9	6,1	0,0%	0,0%
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	11.104.600	1.664.488.000	201.131.000	11.099.000	1.199.847.350	32.741.300	99,9	72,1	16,3	14889,2%	10710,4%
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	3.150.000	7.200.000		3.117.600	1.159.500	0,0	99,0	16,1	0,0%	0,0%
PeningkatanKesehatan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	118.113.000	186.431.000		56.234.000	27.946.800	0,0	47,6	15,0	0,0%	0,0%
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	1.537.825.000	-		1.135.133.350	-	0,0	73,8	0,0	0,0%	0,0%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.104.600	5.400.000	7.500.000	11.099.000	5.362.400	3.635.000	99,9	99,3	48,5	-51,4%	-51,7%
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabnupaten /Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan kesertaan Ber-KB	-	207.000.000	-	-	205.777.600	112.489.200	0,0	99,4	0,0	0,0%	0,0%
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			9.000.000			3.296.000			36,6		
Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	-	207.000.000	186.000.000		205.777.600	112.489.200	0,0	99,4	60,5	0,0%	0,0%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	57.454.000	398.880.000	677.550.000	49.014.000	359.577.500	654.910.400	85,3	90,1	96,7	594,3%	633,6%
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	57.454.000	398.880.000	677.550.000	49.014.000	359.577.500	654.910.400	85,3	90,1	96,7	594,3%	633,6%
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengadaan sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	75.000.000	360.000.000		49.954.000	352.500.000	0,0	66,6	97,9	0,0%	0,0%
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	2.550.000	-	-	2.500.000	0,0	0,0	98,0	0,0%	0,0%
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,<BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	316.880.000	315.000.000		304.623.500	299.910.400	0,0	96,1	95,2	0,0%	0,0%
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	57.454.000	7.000.000	-	49.014.000	5.000.000	-	85,3	71,4	0,0	-87,8%	-89,8%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Farmasi)	2.372.609.490	1.866.910.130	1.363.992.526	2.223.457.460	1.466.164.663	1.218.316.451	93,7	78,5	89,3	-21,3%	-34,1%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.234.713.750	1.798.290.130	1.319.191.676	2.102.738.148	1.402.981.533	1.182.502.301	94,1	78,0	89,6	-19,5%	-33,3%
Pengadaan Obat, Vaksin	901.029.393	677.849.059	540.235.124	811.555.512	561.762.120	529.343.014	90,1	82,9	98,0	-24,8%	-30,8%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.283.802.357	1.053.191.871	746.454.552	1.256.571.636	777.241.693	621.038.787	97,9	73,8	83,2	-18,0%	-38,1%
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	49.882.000	67.249.200	32.502.000	34.611.000	63.977.720	32.120.500	69,4	95,1	98,8	34,8%	84,8%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	137.895.740	68.620.000	44.800.850	120.719.312	63.183.130	35.814.150	87,5	92,1	79,9	-50,2%	-47,7%
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	137.895.740	68.620.000	44.800.850	120.719.312	63.183.130	35.814.150	87,5	92,1	79,9	-50,2%	-47,7%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (Pusk. Kolok)	-	109.461.973	498.925.000	-	109.449.917	491.953.925	0,0	100,0	98,6	0,0%	0,0%
Peningkatan Pelayanan BLUD		109.461.973	498.925.000		109.449.917	491.953.925	0,0	100,0	98,6	0,0%	0,0%
Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	-	109.461.973	498.925.000		109.449.917	491.953.925	0,0	100,0	98,6	0,0%	0,0%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Pusk. Kolok)	1.643.681.883	828.356.501	587.438.000	1.374.291.093	762.734.449	384.467.672	83,6	92,1	65,4	-49,6%	-44,5%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	32.482.000	-	-	18.608.000			57,3		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	32.482.000	-	-	18.608.000			57,3		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.643.681.883	828.356.501	554.956.000	1.374.291.093	762.734.449	365.859.672	83,6	92,1	65,9	-49,6%	-44,5%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15.765.000	42.152.000	57.820.000	14.027.500	38.186.160	48.900.000	89,0	90,6	84,6	167,4%	172,2%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.245.000	1.500.000	22.052.000	7.893.125	1.000.000	19.180.000	85,4	66,7	87,0	-83,8%	-87,3%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8.050.000	16.180.000	-	7.150.000	11.994.000	-	88,8	74,1	0,0	101,0%	67,7%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	18.390.000	11.400.000	27.960.000	15.848.250	11.400.000	26.808.000	86,2	100,0	95,9	-38,0%	-28,1%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.220.000	49.020.000	12.050.000	12.942.100	46.397.440	12.050.000	44,3	94,7	100,0	67,8%	258,5%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	30.841.000	3.100.000	-	30.074.600	250.000	0,0	97,5	8,1	0,0%	0,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	23.590.000	35.138.000	-	22.929.000	34.796.040	-	97,2	99,0	0,0	49,0%	51,8%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.000.000	-	-	2.900.000	-	-	48,3	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	13.000.000			13.000.000			100,0	0,0%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	184.621.250	22.234.000	-	25.311.100	22.184.000	-	13,7	99,8	0,0	-88,0%	-12,4%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15.950.000	21.576.000	139.427.000	14.060.000	20.888.800	46.697.160	88,2	96,8	33,5	35,3%	48,6%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.650.000	7.040.000	-	6.431.500	6.306.560	-	84,1	89,6	0,0	-8,0%	-1,9%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.161.000	20.500.000	20.000.000	15.171.000	19.050.000	14.068.400	88,4	92,9	70,3	19,5%	25,6%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	14.802.000	54.137.725	-	12.207.250	43.470.820	-	82,5	80,3	0,0	265,7%	256,1%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	44.699.493	-	-	44.453.000	-	-	99,4	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	74.845.000	64.050.000	60.700.000	49.544.075	58.403.800	58.050.000	66,2	91,2	95,6	-14,4%	17,9%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	401.389.010	306.494.173	-	391.410.626	299.204.161	-	97,5	97,6	0,0	-23,6%	-23,6%
Pengambilam dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	100,0	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
Operasional Pelayanan Puskesmas	768.804.130	129.093.603	198.847.000	728.012.567	104.928.068	126.856.112	94,7	81,3	63,8	-83,2%	-85,6%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikut Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	500.000	500.000	-	500.000	500.000	-	100,0	100,0	0,0	0,0%	0,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	16.500.000	-	500.000	13.950.000	-	0,0	84,5	0,0	0,0%	2690,0%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.400.000	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-100,0%	0,0%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	8.400.000	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-100,0%	0,0%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	8.400.000	-	-	-	-		0,0	0,0	0,0	-100,0%	0,0%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	2.750.000	159.560.000	-	2.750.000	149.475.300	0,0	100,0	93,7	0,0%	0,0%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			121.510.000			114.245.300			94,0		

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			121.510.000			114.245.300			94,0		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	2.750.000	38.050.000	-	2.750.000	35.230.000	0,0	100,0	92,6	0,0%	0,0%
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	2.750.000	38.050.000	-	2.750.000	35.230.000	0,0	100,0	92,6	0,0%	0,0%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (Pusk. Sei Durian)	-	161.095.835	774.970.731	-	154.409.225	774.970.731	0,0	95,8	100,0	0,0%	0,0%
Peningkatan Pelayanan BLUD		161.095.835	774.970.731		154.409.225	774.970.731	0,0	95,8	100,0	0,0%	0,0%
Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	-	161.095.835	774.970.731		154.409.225	774.970.731	0,0	95,8	100,0	0,0%	0,0%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Pusk. Sei Durian)	2.143.833.731	850.500.250	460.519.000	1.725.092.225	802.352.390	10.233.000	80,5	94,3	2,2	-60,3%	-53,5%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	24.082.000			10.233.000			42,5		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	24.082.000			10.233.000			42,5		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.143.833.731	850.500.250	436.437.000	1.725.092.225	802.352.390		80,5	94,3	0,0	-60,3%	-53,5%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.265.000	28.800.500	17.783.000	5.240.000	26.301.500	16.706.520	99,5	91,3	93,9	447,0%	401,9%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.525.000	-	-	6.925.000	-	-	92,0	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14.562.500	-	-	14.005.000	-	-	96,2	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	32.882.000	14.400.000	23.075.000	32.776.400	14.400.000	18.831.000	99,7	100,0	81,6	-56,2%	-56,1%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.870.000	22.705.000	26.200.000	13.606.000	22.509.200	16.800.000	98,1	99,1	64,1	63,7%	65,4%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	13.650.000	9.476.500	3.800.000	13.200.000	9.179.600	3.600.000	96,7	96,9	94,7	-30,6%	-30,5%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	22.640.000	1.340.000	-	22.258.000	1.122.600	-	98,3	83,8	0,0	-94,1%	-95,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	750.000	-	45.500.000	750.000	-	26.600.000	100,0	0,0	58,5	-100,0%	-100,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	198.290.000	24.000.000	-	67.147.000	23.900.000	-	33,9	99,6	0,0	-87,9%	-64,4%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19.960.000	65.946.898	115.858.000	12.489.000	64.966.350	43.571.200	62,6	98,5	37,6	230,4%	420,2%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.200.000	4.900.000	-	3.080.000	4.320.400	-	96,3	88,2	0,0	53,1%	40,3%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25.675.000	20.585.000	19.900.000	24.175.000	17.531.000	13.650.000	94,2	85,2	68,6	-19,8%	-27,5%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	28.149.000	52.432.500	-	22.650.000	50.534.100	-	80,5	96,4	0,0	86,3%	123,1%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	68.250.000	-	-	49.875.000	-	-	73,1	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4.000.000	-	-	4.000.000	-	-	100,0	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	65.650.000	21.800.000	36.900.000	36.040.000	21.250.000	32.150.000	54,9	97,5	87,1	-66,8%	-41,0%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	687.745.089	435.399.300	-	611.698.780	408.179.841	-	88,9	93,7	0,0	-36,7%	-33,3%
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	-	1.000.000	-	-	900.000	-	0,0	90,0	0,0	0,0%	0,0%
Operasional Pelayanan Puskesmas	928.020.142	122.214.552	147.421.000	781.427.045	112.457.799	73.144.199	84,2	92,0	49,6	-86,8%	-85,6%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.750.000	1.000.000	-	3.750.000	300.000	-	100,0	30,0	0,0	-73,3%	-92,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	24.500.000	-	-	24.500.000	-	0,0	100,0	0,0	0,0%	0,0%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.400.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	0,0	100,0	0,0	42,9%	0,0%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	8.400.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	0,0	100,0	0,0	42,9%	0,0%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	8.400.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	0,0	100,0	0,0	42,9%	0,0%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8.578.500	84.690.000	-	8.578.500	41.471.600	0,0	100,0	49,0	0,0%	0,0%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	84.690.000			37.571.600			44,4		

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	84.690.000			37.571.600			44,4		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	8.578.500	-	-	8.578.500	3.900.000	0,0	100,0	0,0	0,0%	0,0%
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	8.578.500	8.600.000	-	8.578.500	3.900.000	0,0	100,0	45,3	0,0%	0,0%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (Pusk. Silungkang)	-	184.884.057	916.156.000	-	183.338.919	835.913.372	0,0	99,2	91,2	0,0%	0,0%
Peningkatan Pelayanan BLUD		184.884.057	916.156.000		183.338.919	835.913.372	0,0	99,2	91,2	0,0%	0,0%
Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	-	184.884.057	916.156.000		183.338.919	835.913.372	0,0	99,2	91,2	0,0%	0,0%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Pusk. Silungkang)	2.249.189.461	991.179.550	579.663.000	1.769.282.407	893.605.171	369.029.819	78,7	90,2	63,7	-55,9%	-49,5%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	29.388.000	-	-	17.843.000			60,7		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	29.388.000	-	-	17.843.000			60,7		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.249.189.461	991.179.550	550.275.000	1.769.282.407	893.605.171	351.186.819	78,7	90,2	63,8	-55,9%	-49,5%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	21.405.000	68.730.500	23.655.000	8.616.150	54.159.600	19.426.000	40,3	78,8	82,1	221,1%	528,6%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	7.000.000	5.800.000	-	3.196.000	2.620.000	0,0	45,7	45,2	0,0%	0,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.457.000	150.000	-	11.500.000	-	-	92,3	0,0	0,0	-98,8%	-100,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	22.001.750	9.145.000	56.879.000	7.384.000	8.234.000	54.194.400	33,6	90,0	95,3	-58,4%	11,5%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.295.000	16.500.000	10.750.000	4.500.000	16.380.000	8.800.000	22,2	99,3	81,9	-18,7%	264,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	8.148.935	22.125.000	9.080.000	6.650.000	16.930.000	5.450.000	81,6	76,5	60,0	171,5%	154,6%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	17.824.400	19.240.000	-	9.450.000	15.795.200		53,0	82,1	0,0	7,9%	67,1%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.304.000	-	14.250.000	8.350.000	-	7.500.000	73,9	0,0	52,6	-100,0%	-100,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	300.000	-	-	300.000	-		100,0	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	203.232.000	33.974.000	-	39.025.000	33.550.000		19,2	98,8	0,0	-83,3%	-14,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36.226.000	47.330.000	158.611.000	24.108.100	43.139.400	105.455.243	66,5	91,1	66,5	30,7%	78,9%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.537.000	14.680.000	-	500.000	4.340.000		19,7	29,6	0,0	478,6%	768,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.654.000	20.125.000	26.300.000	5.450.000	10.000.000	14.250.000	30,9	49,7	54,2	14,0%	83,5%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	44.500.000	33.790.000	-	22.570.400	32.937.000		50,7	97,5	0,0	-24,1%	45,9%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	68.924.920	-	-	64.680.000	-		93,8	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	11.757.000	-	-	3.500.000	-		29,8	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	46.884.000	75.736.000	65.050.000	22.860.000	63.376.800	48.900.000	48,8	83,7	75,2	61,5%	177,2%
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	718.404.480	474.114.970		607.038.622	462.921.541		84,5	97,6	0,0	-34,0%	-23,7%
Operasional Pelayanan Puskesmas	984.833.976	123.589.080	179.900.000	922.800.135	114.545.630	84.591.176	93,7	92,7	47,0	-87,5%	-87,6%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	500.000	500.000	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	24.450.000	-	-	14.100.000	-	0,0	57,7	0,0	0,0%	0,0%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.400.000	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-100,0%	0,0%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	8.400.000	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-100,0%	0,0%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	8.400.000	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-100,0%	0,0%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8.200.000	96.160.000	-	8.200.000	- 61.773.440	0,0	100,0	-64,2	0,0%	0,0%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	87.510.000	-	-	- 66.753.440	0,0	0,0	-76,3	0,0%	0,0%
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	87.510.000	-	-	66.753.440	0,0	0,0	76,3	0,0%	0,0%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	8.200.000	8.650.000	-	8.200.000	4.980.000	0,0	100,0	57,6	0,0%	0,0%
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	8.200.000	8.650.000	-	8.200.000	4.980.000	0,0	100,0	57,6	0,0%	0,0%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (Pusk. Talawi)	-	365.996.710	1.628.000.000	-	340.478.653	1.546.427.369	0,0	93,0	95,0	0,0%	0,0%
Peningkatan Pelayanan BLUD		365.996.710	1.628.000.000		340.478.653	1.546.427.369	0,0	93,0	95,0	0,0%	0,0%
Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	-	365.996.710	1.628.000.000		340.478.653	1.546.427.369	0,0	93,0	95,0	0,0%	0,0%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Pusk. Talawi)	3.437.997.252	1.669.869.900	784.146.000	2.597.739.535	1.504.395.802		75,6	90,1	0,0	-51,4%	-42,1%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	40.973.000	-	-	30.026.000			73,3		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	40.973.000	-	-	30.026.000			73,3		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.437.997.252	1.669.869.900	743.173.000	2.597.739.535	1.504.395.802	424.548.525	75,6	90,1	57,1	-51,4%	-42,1%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.837.000	84.790.000	50.249.000	14.543.000	70.971.960	35.196.000	29,8	83,7	70,0	73,6%	388,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.075.000	5.250.000	3.605.000	3.075.000	3.923.000		100,0	74,7	0,0	70,7%	27,6%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8.827.000	-	-	2.700.750	-		30,6	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	15.585.950	11.850.000	75.740.000	3.543.500	11.850.000	53.656.000	22,7	100,0	70,8	-24,0%	234,4%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.539.235	70.396.000	38.100.000	20.357.600	53.199.600	31.300.000	79,7	75,6	82,2	175,6%	161,3%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	13.437.600	14.952.000	9.050.000	8.663.000	12.743.800	5.500.000	64,5	85,2	60,8	11,3%	47,1%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	26.400.600	25.560.000	-	19.385.000	24.902.880	-	73,4	97,4	0,0	-3,2%	28,5%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5.117.800	-	-	3.462.250	-	-	67,7	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.817.800	-	-	1.811.000	-	-	99,6	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.888.800	-	11.600.000	360.000	-	8.200.000	19,1	0,0	70,7	-100,0%	-100,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	250.432.400	44.716.000	-	51.765.000	43.366.000	-	20,7	97,0	0,0	-82,1%	-16,2%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48.003.000	45.578.500	188.315.000	34.111.500	38.942.000	93.396.067	71,1	85,4	49,6	-5,1%	14,2%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.764.900	5.187.000	-	2.432.500	4.772.800	-	64,6	92,0	0,0	37,8%	96,2%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	35.608.800	29.514.000	41.200.000	20.709.000	28.114.000	29.300.000	58,2	95,3	71,1	-17,1%	35,8%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	14.029.000	41.308.000	-	10.567.500	24.411.900	-	75,3	59,1	0,0	194,4%	131,0%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	56.998.972	-	-	49.104.000	-	-	86,1	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3.307.000	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-100,0%	0,0%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	62.730.400	110.849.437	74.500.000	25.726.500	81.007.400	58.400.000	41,0	73,1	78,4	76,7%	214,9%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.764.643.591	921.253.000	-	1.340.486.048	855.066.211	-	76,0	92,8	0,0	-47,8%	-36,2%
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.075.000	1.950.000	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-6,0%	0,0%
Operasional Pelayanan Puskesmas	1.045.727.404	241.415.963	250.814.000	984.936.387	236.474.251	109.600.458	94,2	98,0	43,7	-76,9%	-76,0%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	150.000	650.000	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	333,3%	0,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	14.650.000	-	-	14.650.000	-	0,0	100,0	0,0	0,0%	0,0%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	16.800.000	28.800.000	-	-	24.000.000	-	0,0	83,3	0,0	71,4%	0,0%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	16.800.000	28.800.000	-	-	24.000.000	-	0,0	83,3	0,0	71,4%	0,0%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	16.800.000	28.800.000	-	-	24.000.000	-	0,0	83,3	0,0	71,4%	0,0%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	2.400.000	158.075.000	-	2.400.000	81.640.400	0,0	100,0	51,6	0,0%	0,0%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	147.537.000	-	-	81.640.400			55,3		

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	147.537.000	-	-	81.640.400			55,3		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	2.400.000	10.538.000	-	2.400.000	-	0,0	100,0	0,0	0,0%	0,0%
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	2.400.000	10.538.000	-	2.400.000	-	0,0	100,0	0,0	0,0%	0,0%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (Pusk. Kp Teleng)	-	120.447.769	647.377.754	-	118.764.435	646.583.056	0,0	98,6	99,9	0,0%	0,0%
Peningkatan Pelayanan BLUD		120.447.769	647.377.754		118.764.435	646.583.056	0,0	98,6	99,9	0,0%	0,0%
Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	-	120.447.769	647.377.754		118.764.435	646.583.056	0,0	98,6	99,9	0,0%	0,0%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Pusk. Kp Teleng)	1.851.243.808	800.520.248	485.046.500	1.495.664.233	765.032.846	291.749.006	80,8	95,6	60,1	-56,8%	-48,8%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	24.082.000			15.908.000			66,1		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	24.082.000		-	15.908.000			66,1		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.851.243.808	800.520.248	460.964.500	1.495.664.233	765.032.846	275.841.006	80,8	95,6	59,8	-56,8%	-48,8%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.815.110	64.661.000	47.760.000	33.633.000	62.312.000	35.184.000	93,9	96,4	73,7	80,5%	85,3%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.020.000	4.152.000	6.828.000	5.000.000	4.120.800	6.758.400	62,3	99,2	99,0	-48,2%	-17,6%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7.250.000	4.050.000	-	6.400.000	3.900.000	-	88,3	96,3	0,0	-44,1%	-39,1%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	6.788.000	16.800.000	42.676.000	4.850.000	16.800.000	28.775.200	71,4	100,0	67,4	147,5%	246,4%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.160.000	34.010.750	10.150.000	14.200.000	32.766.750	8.000.000	64,1	96,3	78,8	53,5%	130,8%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5.500.000	9.141.000	14.950.000	1.950.000	9.120.000	12.050.000	35,5	99,8	80,6	66,2%	367,7%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.788.000	22.790.000	-	6.285.600	18.466.000	-	92,6	81,0	0,0	235,7%	193,8%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.300.000	-	12.900.000	1.300.000	-	8.550.000	100,0	0,0	66,3	-100,0%	-100,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	195.235.814	26.370.000	-	48.276.250	24.395.000	-	24,7	92,5	0,0	-86,5%	-49,5%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	53.631.040	47.064.000	113.977.500	49.356.200	45.691.400	58.410.174	92,0	97,1	51,2	-12,2%	-7,4%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.696.000	9.550.000	-	1.303.600	8.178.400	-	48,4	85,6	0,0	254,2%	527,4%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	39.500.000	18.481.250	28.750.000	23.298.900	17.980.450	21.800.000	59,0	97,3	75,8	-53,2%	-22,8%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	39.297.710	17.150.000	-	31.955.350	15.650.000	-	81,3	91,3	0,0	-56,4%	-51,0%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40.117.905	1.600.000	-	33.288.750	800.000	-	83,0	50,0	0,0	-96,0%	-97,6%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.500.000	-	-	600.000	-	-	40,0	0,0	0,0	-100,0%	-100,0%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	47.336.940	59.345.000	35.550.000	22.277.050	56.052.000	25.400.000	47,1	94,5	71,4	25,4%	151,6%
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	455.554.342	340.786.248	-	401.957.419	331.762.947	-	88,2	97,4	0,0	-25,2%	-17,5%
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-	0,0	100,0	0,0	0,0%	0,0%
Operasional Pelayanan Puskesmas	879.452.947	103.619.000	147.423.000	807.932.114	99.537.099	70.913.232	91,9	96,1	48,1	-88,2%	-87,7%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.300.000	3.750.000	-	1.800.000	300.000	-	54,5	8	0,0	13,6%	-83,3%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	15.200.000	-	-	15.200.000	-	0,0	100	0,0	0,0%	0,0%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.400.000	-	-	-	-	-	0,0	0	0,0	-100,0%	0,0%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	8.400.000	-	-	-	-	-	0,0	0	0,0	-100,0%	0,0%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	8.400.000	-	-	-	-	-	0,0	0	0,0	-100,0%	0,0%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	7.850.000	68.762.500	-	7.850.000	35.827.720	0,0	100	52,1	0,0%	0,0%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	62.412.500			35.827.720			57,4		

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	62.412.500			35.827.720			57,4		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	7.850.000	6.350.000	-	7.850.000	-	0,0	100	0,0	0,0%	0,0%
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	7.850.000	6.350.000	-	7.850.000	-	0,0	100	0,0	0,0%	0,0%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (Pusk. Lunto)	-	94.348.282	448.915.068	-	91.640.185	396.720.377	0,0	97,1	88,4	0,0%	0,0%
Peningkatan Pelayanan BLUD		94.348.282	448.915.068		91.640.185	396.720.377	0,0	97,1	88,4	0,0%	0,0%
Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	-	94.348.282	448.915.068		91.640.185	396.720.377	0,0	97,1	88,4	0,0%	0,0%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Pusk. Lunto)	1.413.815.149	675.376.267	462.489.100	1.133.513.460	634.376.778	234.062.700	80,2	93,9	50,6	-52,2%	-44,0%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	23.993.000	-	-	10.733.000			44,7		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	23.993.000	-	-	10.733.000			44,7		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.413.815.149	675.376.267	438.496.100	1.133.513.460	634.376.778	223.329.700	80,2	93,9	50,9	-52,2%	-44,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	21.768.400	64.082.100	25.120.000	21.437.500	59.640.400	13.061.320	98,5	93,1	52,0	194,4%	178,2%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.300.000	3.089.000	7.320.100	9.000.000	2.419.200	2.558.000	96,8	78,3	34,9	-66,8%	-73,1%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	250.000	150.000	-	-	150.000	-	0,0	100,0	0,0	-40,0%	0,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	18.786.000	10.700.000	38.138.000	17.798.600	10.400.000	34.190.000	94,7	97,2	89,6	-43,0%	-41,6%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.620.000	31.834.400	11.000.000	16.957.625	31.661.600	11.000.000	91,1	99,5	100,0	71,0%	86,7%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3.740.000	12.600.000	12.700.000	2.979.000	11.800.000	6.100.000	79,7	93,7	48,0	236,9%	296,1%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	20.050.000	21.090.000	-	18.000.000	20.603.000	-	89,8	97,7	0,0	5,2%	14,5%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	200.000	-	9.500.000	200.000	-	2.300.000	100,0	0,0	24,2	-100,0%	-100,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	164.241.000	23.003.500	-	30.281.000	23.003.500	-	18,4	100,0	0,0	-86,0%	-24,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	38.276.000	14.392.000	116.689.000	37.810.750	14.305.000	41.833.740	98,8	99,4	35,9	-62,4%	-62,2%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.650.000	1.902.000	-	9.643.125	1.318.800	-	90,5	69,3	0,0	-82,1%	-86,3%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	27.700.000	20.204.000	34.100.000	25.902.625	18.214.000	30.200.000	93,5	90,2	88,6	-27,1%	-29,7%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	29.789.000	13.812.000	-	27.236.775	13.761.000	-	91,4	99,6	0,0	-53,6%	-49,5%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.100.000	300.000	-	19.998.000	300.000	-	99,5	100	0,0	-98,5%	-98,5%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.800.000	-	-	1.800.000	-	-	100,0	0	0,0	-100,0%	-100,0%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48.553.000	78.886.325	37.050.000	38.598.750	61.733.850	20.450.000	79,5	78,3	55,2	62,5%	59,9%
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	339.250.897	271.007.613	-	320.418.340	263.061.443	-	94,4	97,1	0,0	-20,1%	-17,9%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-	0,0	100,0	0,0	0,0%	0,0%
Operasional Pelayanan Puskesmas	640.140.852	92.873.329	146.879.000	535.451.370	87.644.985	61.636.640	83,6	94,4	42,0	-85,5%	-83,6%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000	1.000.000	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	66,7%	0,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	12.450.000	-	-	12.360.000	-	0,0	99,3	0,0	0,0%	0,0%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.400.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	-	100,0	0,0	42,9%	0,0%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	8.400.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	-	100,0	0,0	42,9%	0,0%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	8.400.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	0,0	100,0	0,0	42,9%	0,0%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	3.733.400	84.282.900	-	3.688.000	66.045.100	-	98,8	78,4	0,0%	0,0%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	84.282.900	-	-	66.045.100	-	-	78,4		
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	84.282.900	-	-	66.045.100	-	-	78,4		

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	3.733.400		-	3.688.000	-	-	98,8	0,0	0,0%	0,0%
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	3.733.400	5.004.000	-	3.688.000	-	0,0	98,8	0,0	0,0%	0,0%

Tabel 2.5
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BLUD UPTD RSUD Kota Sawahlunto

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pendapatan											
A. BLUD											
1. RSUD Sawahlunto	20.000.000.000	33.000.000.000	30.000.000.000	22.269.671.071	37.092.823.506	25.609.336.835	111,35 %	112,40 %	85,36%	27,95%	17,80%
Belanja Daerah	65.347.144.360	67.327.721.738	76.324.730.877	62.070.037.750	65.089.820.114	73.517.490.589	94,99%	96,68%	96,32%	8,20%	8,91%
Belanja Operasi	56.995.930.360	65.198.453.981	64.949.830.992	54.125.282.235	63.108.996.446	64.949.830.992	94,96%	96,80%		7,01%	9,76%
Belanja Modal	8.351.214.000	2.129.267.757	11.374.899.885	7.944.755.515	1.980.823.668	11.374.899.885	95,13%	93,03%		179,86%	199,59%
									94,56%		

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.384.933.826	64.696.580.491	64.431.501.667	49.566.220.813	63.274.210.762	62.355.323.279	96,46%	97,80%	96,78%	12,75%	13,10%
Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.233.019.487	28.936.583.185	31.614.858.047	28.648.195.633	28.431.165.203	30.068.866.014	94,76%	98,25%	95,11%	2,48%	2,50%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.233.019.487	28.936.583.185	31.614.858.047	28.648.195.633	28.431.165.203	30.068.866.014	94,76%	98,25%	95,11%	2,48%	2,50%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	13.590.910	-	-	13.490.910		-	99,26%	-	50,00%	50,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	13.590.910	-	-	13.490.910		-	99,26%	-	50,00%	50,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	707.292.008	2.491.496.396	2.480.849.620	690.663.622	2.292.391.312	2.425.892.918	97,65%	92,01%	97,78%	125,92%	118,87%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	707.292.008	757.765.396	698.693.700	690.663.622	735.712.212	697.545.492	97,65%	97,09%	99,84%	-0,33%	0,67%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	1.733.731.000	1.782.155.920	-	1.556.679.100	1.728.347.426	-	89,79%	96,98%	2,79%	11,03%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	444.622.331	254.910.000	335.794.000	401.796.252	243.589.947	331.367.354	90,37%	95,56%	98,68%	-5,47%	-1,67%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	444.622.331	254.910.000		401.796.252	243.589.947	331.367.354	90,37%	95,56%	98,68%	71,33%	-69,69%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	20.000.000.000	33.000.000.000	30.000.000.000	19.825.565.306	32.293.573.390	29.529.196.993	99,13%	97,86%	98,43%	27,95%	-18,56%
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	20.000.000.000	33.000.000.000	300.000.000.000	19.825.565.306	32.293.573.390	29.529.196.993	99,13%	97,86%	98,43%	-17,50%	-18,56%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.745.031.939	2.631.141.247	11.893.229.210	10.827.616.940	1.815.609.352	11.162.167.310	92,19%	69,00%	93,85%	137,21%	215,78%
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.674.551.539	2.555.141.247	11.680.969.210	8.861.004.540	1.739.634.352	10.971.447.225	91,59%	68,08%	93,93%	141,78%	225,15%
Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit			11.121.450.710			10.614.392.225			95,44%	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	-	650.000.000	-	-	-		-	0,00%		50,00%	0,00%
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	1.765.676.847		-	1.639.634.352		-	92,86%		50,00%	50,00%
Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.261.955.439	-		8.489.223.540	-		91,66%	-		0,00%	0,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	150.000.000	-	374.518.500	148.464.000	-	173.555.000	98,98%	-	46,34%	50,00%	50,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	82.636.000	100.000.000	185.000.000	43.779.000	100.000.000	183.500.000	52,98%	100,00 %	99,19%	53,01%	105,96%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	179.960.100	39.464.400	-	179.538.000	-	-	99,77%	0,00%	-	-78,07%	0,00%

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.974.340.400	-	112.320.000	1.890.862.400	-	106.970.085	95,77%	-	95,24%	-100,00%	-100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	107.650.000	-	-	97.650.000	-	-	90,71%	-	-	0,00%	0,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi	1.866.690.400	-	112.320.000	1.793.212.400	-	106.970.085	96,06%	-	95,24%	100,00%	100,00%
Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.140.000	76.000.000	99.940.000	75.750.000	75.975.000	83.750.000	78,79%	99,97%	83,80%	5,28%	5,26%
Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	96.140.000	76.000.000	99.940.000	75.750.000	75.975.000	83.750.000	78,79%	99,97%	83,80%	5,28%	5,26%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.217.178.595	-		1.676.200.113	-		75,60%	-		0,00%	0,00%
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	2.217.178.595	-		1.676.200.113	-	-	75,60%	-	-	0,00%	0,00%
Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.217.178.595	-		1.676.200.113	-	-	75,60%	-	-	0,00%	0,00%

Secara umum target di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto termasuk Kategori baik, namun penyerapan dana/ realisasi anggaran yang dilaksanakan tidak dapat terserap 100%. Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2021 penyerapan anggaran sekitar 86,8% lebih sedikit penyerapannya jika dibandingkan dengan tahun 2022 97,1% hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan diantaranya :

1. Adanya perubahan regulasi terkait pengelolaan dana alokasi khusus bidang Kesehatan tentang perubahan kodefikasi dan nomenklatur kegiatan sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan dana alokasi khusus.
2. Masih dalam kondisi pandemic Covid-19 sehingga kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak yang ditunda dan dihentikan pelaksanaan kegiatan selama masa pandemic covid-19 ini.
3. Perencanaan kegiatan yang tidak optimal menyebabkan penyerapan yang tidak maksimal dilaksanakan.
4. Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Kesehatan, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah semua lintas sektor baik itu SKPD yang berhubungan dengan penerima layanan kesehatan seperti Desa/Kelurahan, Polsek, Danramil, PKK, Tokoh masyarakat, masyarakat serta mitra lainnya yang berhubungan dengan pencapaian target kinerja perangkat daerah agar tujuan SKPD dapat dicapai.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1 Derajat Kesehatan

A. Mortalitas

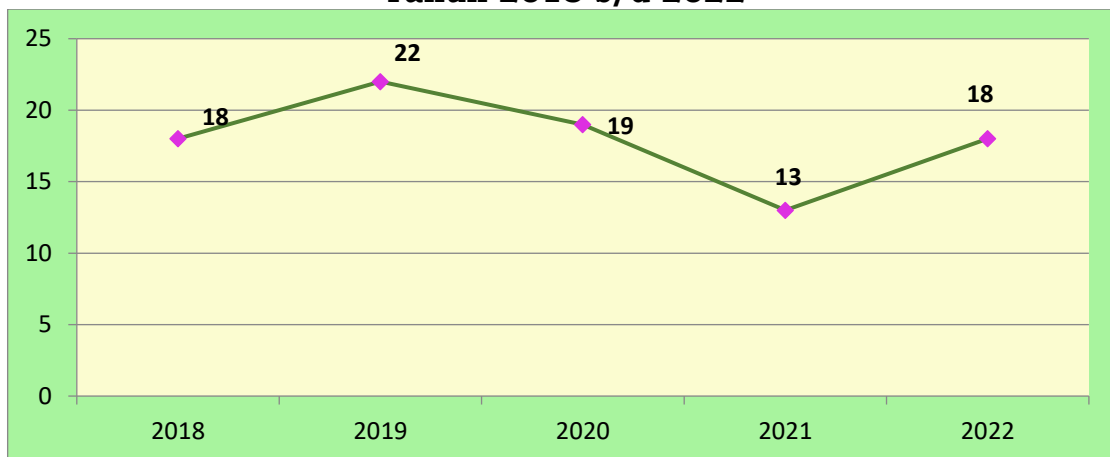
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak dilaksanakan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita.

1. Jumlah Kematian Bayi

Angka kematian bayi adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian.

Gambaran angka kematian bayi di Kota Sawahlunto dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 3.1
Jumlah Kematian Bayi di Kota Sawahlunto
Tahun 2018 s/d 2022



Sumber : Laporan Profil Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018-2022

Dari diagram diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Sawahlunto pada tahun 2018 kematian bayi ditemukan sebanyak 18 dari 1000 kelahiran hidup dengan angka kematian bayi (AKB) 17.98, dan pada tahun 2019 sebanyak 22 dari 1000 kelahiran hidup dengan angka kematian bayi (AKB) 22.04, pada tahun 2020 dan 2021 adanya penurunan kematian bayi dan tahun 2022 adanya peningkatan yang signifikan kematian bayi 18 orang dari 1000 kelahiran hidup atau 20,1. Menyadari hal tersebut dilakukan berbagai upaya dalam rangka menurunkan AKB ini yaitu pemantauan ibu hamil resiko tinggi dan bayi baru lahir dengan komplikasi, penyuluhan dan konseling tentang kesehatan ibu dan anak, program P4K dan Sosialisasi/Promosi AKI & AKB, kelas ibu hamil serta program Jampersal dan program jaminan Kesehatan kota sawahlunto.

2. Jumlah Kematian Ibu

Kematian ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan kecelakaan atau cedera. Pada tahun 2018 tidak terjadi kematian ibu di Kota Sawahlunto, dan adanya peningkatan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 3 orang.

Tabel 3.1
Jumlah Kematian Ibu Di Kota Sawahlunto
Tahun 2018 s/d 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kematian Ibu	0	3	2	1	2
	a. Kematian Ibu Hamil	0	2	1	0	0
	b. Kematian Ibu Bersalin	0	0	0	0	0
	c. Kematian Ibu Nifas	0	1	1	1	2

Sumber : Laporan Profil Kesehatan Tahun 2018-2022

Dari tabel 3.1 dapat dilihat kematian ibu terjadi pada masa kehamilan dan nifas, 5 kasus kematian ibu terjadi pada masa nifas dan 3 kasus pada masa kehamilan dengan penyebab kematian ibu yaitu perdarahan. Adapun upaya yang dilakukan adalah meningkatkan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan program KIA dan Kespro, pelaksanaan Review Maternal dan Perinatal (RMP) serta peningkatan sosialisasi tentang kelas ibu hamil dan program P4K.

3. Angka Harapan Hidup (AHH)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) definisi Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur X, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat. Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*age specific death rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) sangat berpengaruh pada kenaikan Umur Harapan Hidup (UHH) waktu lahir. AKB sangat peka terhadap perubahan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perbaikan derajat kesehatan tercermin pada penurunan AKB dan kenaikan AHH pada waktu lahir. Angka umur harapan hidup dikeluarkan oleh BPS setiap tahun. Angka umur harapan hidup yang dikeluarkan BPS per Februari adalah angka umur harapan hidup tahun sebelumnya. Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 adalah 69.80, dan untuk Kota Sawahlunto Angka Harapan Hidup adalah 70.40.

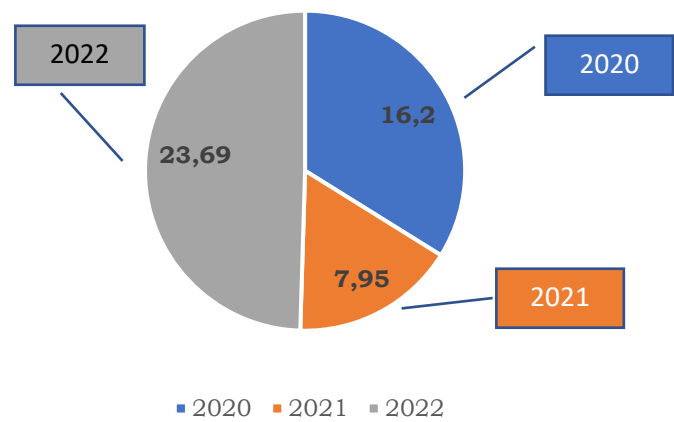
B. Morbiditas

Definisi Morbiditas adalah keadaan sakit; terjadinya penyakit atau kondisi yang mengubah kesehatan dan kualitas hidup. Standar pelayanan minimal yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022 salah satunya pengelolaan pelayan Kesehatan penyakit hipertensi, diabetes melitus, pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis, orang dengan risiko terinfeksi HIV/Aids.

1. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Adalah Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Gambar 3.2
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Kota sawahlunto Tahun 2020-2022



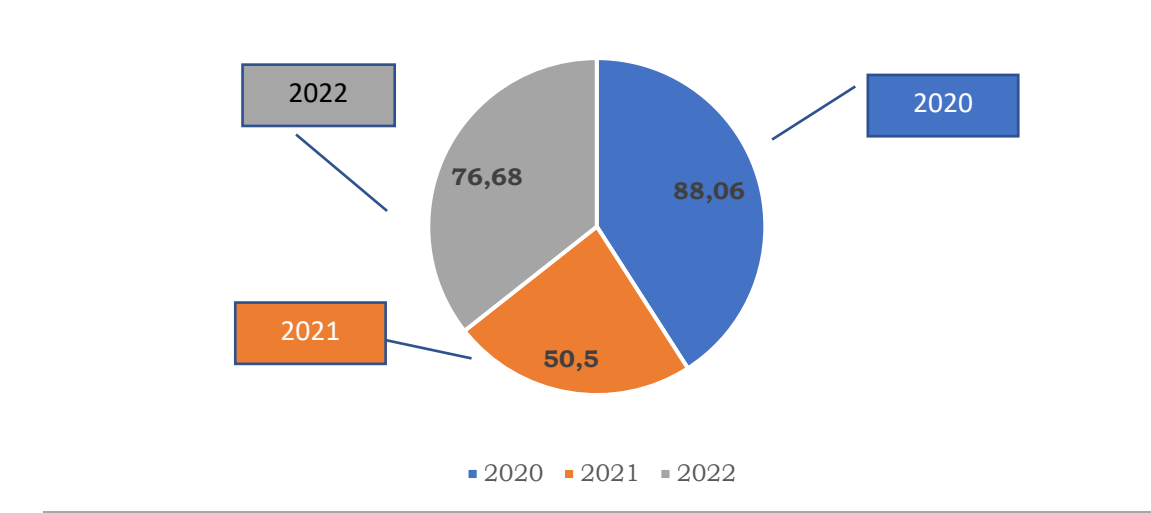
Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Kb Tahun 2020-2022

Dari gambar 3.2 adanya peningkatan penderita hipertensi yang dilayani sesuai dengan standar yaitu 7,95% pada tahun 2021 meningkat 23,69% penderita yang dilayani sesuai standar pada tahun 2022.

2. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Adalah Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Gambar 3.3
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
Kota sawahlunto Tahun 2020-2022

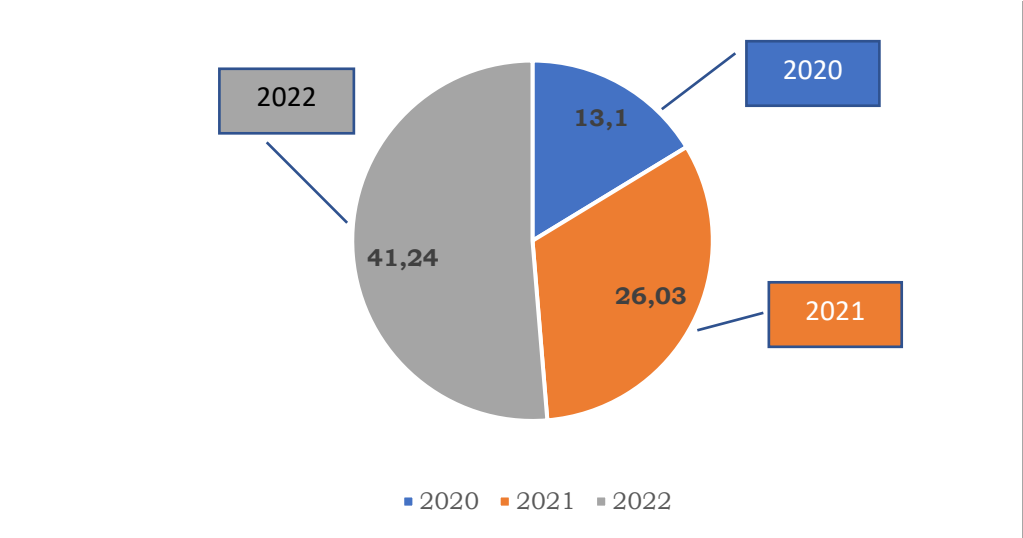


Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Kb Tahun 2020-2022

Dari gambar 3.3 dapat dilihat adanya peningkatan penderita diabetes mellitus dari tahun 2021 dari 431 orang (50.5%) menjadi 661 orang (76.68%).

3. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)
Adalah Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya.

Gambar 3.4
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Kota sawahlunto Tahun 2020-2022



Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Kb Tahun 2020-2022

Dari gambar 3.4 penderita terduga tuberculosi mengalami peningkatan, hal ini tidak lepas dari upaya tenaga Kesehatan untuk melakukan penjangran di lapangan dengan melakukan kunjungan rumah, pemberian informasi kepada masyarakat serta memberikan edukasi tentang penyakit tuberculosi. Pada tahun 2021 ditemukan 482 orang (26,03%) dari target 1.852 dan tahun 2022 763 orang (41.24%) dari target 1.850 orang.

Tabel 3.2
Angka Kesembuhan Lengkap Serta Keberhasilan Pengobatan
Tuberkulosis Per Puskesmas Se Kota Sawahlunto Tahun 2022

No	Puskesmas	Jumlah Kasus Tb Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Yg Terdaftar Dan Diobati Jumlah	Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis Terdaftar Dan Diobati Jumlah	Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis		Angka Pengobatan Lengkap (Complete Rate) Semua Kasus Tuberkulosis		Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate/ Sr) Semua Kasus Tuberkulosis		Jumlah Kematian Selama Pengobatan Tuberkulosis	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Talawi	5	6	2	40	4	66,7	6	100	0	0,
2	Kolok	4	5	2	50	2	40	4	80	1	20
3	Sei. Durian	2	3	1	50	2	66,7	3	100	0	0
4	Kampung Teleng	8	13	2	25	12	92,3	13	100	0	0
5	Lunto	2	2	1	50	0	0	2	100	0	0
6	Silungkang	10	16	7	70	9	56,3	16	100	0	0
7	RSUD	7	13	4	60	8	61,5	12	92,3	1	0,07
	Kota	38	58	19	50	37	63,8	56	96,5	2	0,03

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2022

Terlihat pada tabel 3.2 diatas bahwa belum semua pasien TBC menyelesaikan minum obat rutinnya hanya 96,5% yang menyelesaikan pengobatan begitu pula dengan kesembuhan baru 50%, ada 19 orang yang TBC yang pengobatan lengkap tapi pada bulan ke 6 setelah minum obat tidak melakukan pemeriksaan dahak lagi dengan berbagai alasan tidak bisa diambil, pasien yang meninggal karena TBC sebanyak 0,03% hal ini salah satu penyebabnya adalah karena tidak mau berobat lengkap dan masih percaya dengan pengobatan alternatif.

Tabel 3.3
Persentase Angka Notifikasi Kasus TB (CNR)
Di Puskesmas Se- Kota Sawahlunto Tahun 2021 Dan 2022

No	Puskesmas	Tahun 2021 (65%)			Tahun 2022 (65%)		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Talawi	19.877	6	30,19	20.049	16	79,8
2	Kolok	7384	5	67,71	7.447	6	80,57
3	Sei. Durian	11.626	3	25,80	11.726	5	42,64
4	Kampung Teleng	8.581	13	151,50	8.654	7	80,88
5	Lunto	5.071	2	39,44	5.114	5	97,77
6	Silungkang	11.383	16	140,56	11.480	9	78,40
7	Rsud		13			36	
	KOTA	63.922	58	90,73	64.470	84	130,29

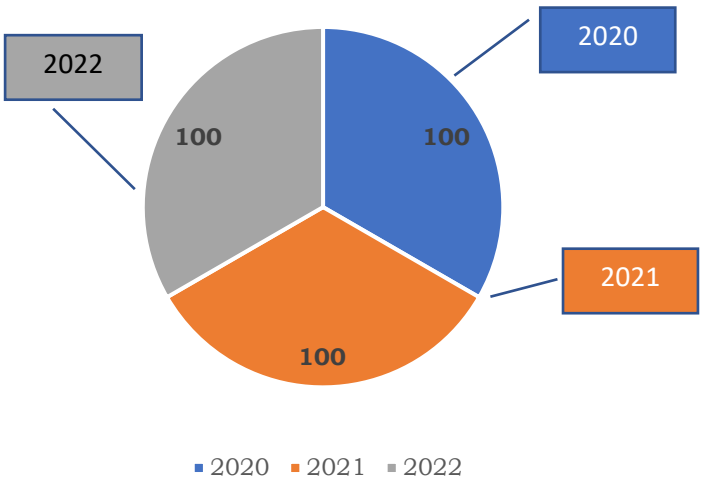
Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa untuk Angka Notifikasi Kasus (Case Notification Rate=CNR) pada tahun 2022 sebesar 130,29 per 100.000 penduduk, Jika dievaluasi di tingkat puskesmas maka dapat dilihat bahwa puskesmas yang mengalami peningkatan yaitu puskesmas Talawi, Kolok,

S.Durian, dan Lunto, Puskesmas Kampung Teleng dan Silungkang mengalami penurunan.

4. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV/Aids
- Adalah Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV/Aids sesuai standar.
- AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrom) merupakan sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang didapat, AIDS disebabkan oleh virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) yang hidup didalam 4 cairan tubuh manusia yaitu cairan darah, sperma, vagina dan air susu ibu.
- Penderita HIV positif adalah seseorang yang telah terinfeksi virus HIV yang dapat menularkan penyakitnya walaupun nampak sehat dan tidak menunjukkan gejala penyakit apapun. Sedangkan penderita AIDS adalah seseorang yang menunjukkan tanda-tanda dari sekumpulan gejala penyakit yang memerlukan pengobatan setelah sekian waktu terinfeksi HIV.
- Penyakit HIV/AIDS ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, karena secara epidemiologi dari 1 kasus HIV terdapat 100 orang dibelakangnya yang berisiko tertular. Untuk itu, perlu upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang melibatkan berbagai sektor terkait termasuk masyarakat sendiri dalam hal perubahan perilaku. Untuk pengendalian penyakit menular peranan dari lintas sektor dan program terkait sangat penting agar hasil lebih optimal

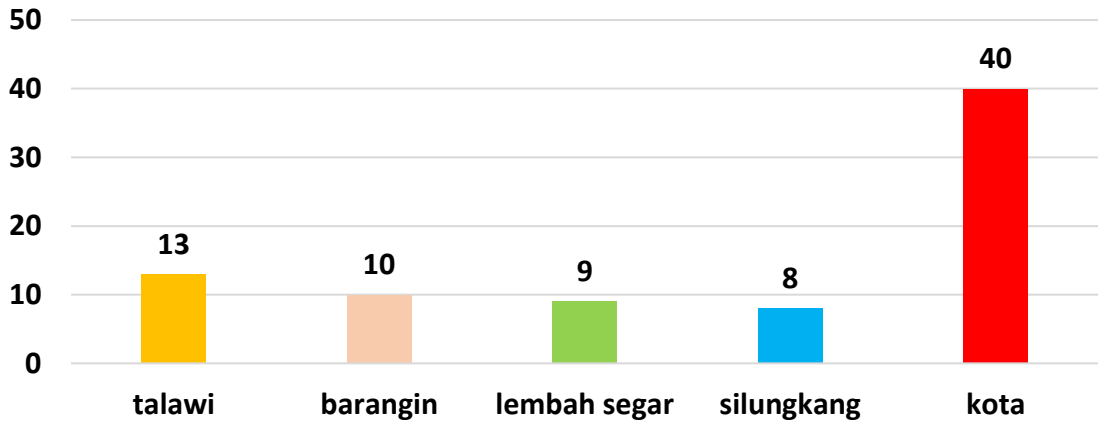
Gambar 3.5
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV/Aids
Kota sawahlunto Tahun 2020-2022



Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Kb Tahun 2020-2022

Dari gambar 3.5 dapat dilihat pelayanan Kesehatan orang terduga HIV/Aids sudah dilakukan sesuai dengan standar. Setiap penderita yang terduga dilakukan pemeriksaan RDT untuk mengetahui apakah seseorang tersebut terinfeksi atau tidak.

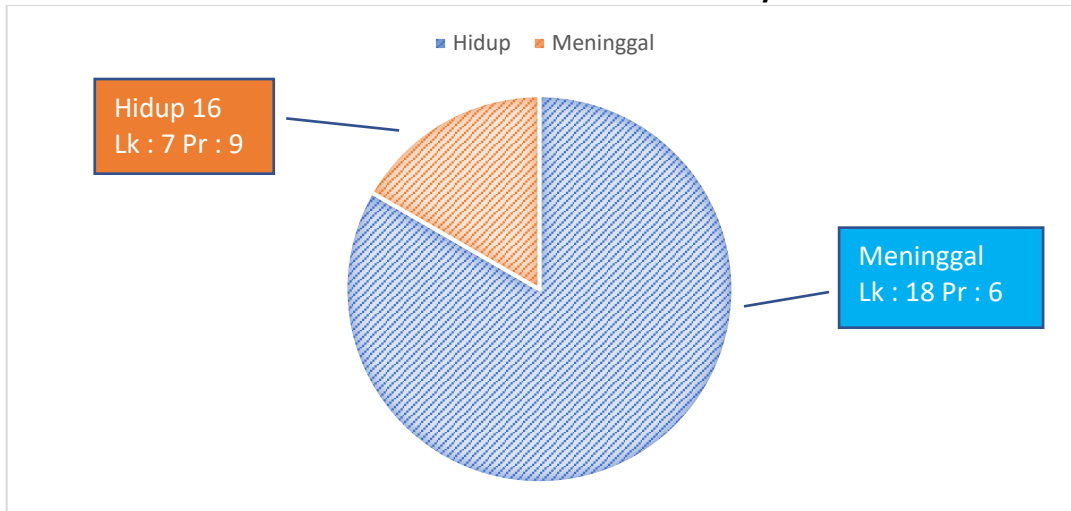
Gambar 3.6
KASUS HIV AIDS KOTA SAWAHLUNTO PER KECAMATAN
DARI TAHUN 2002 S/D 2022



Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2022

Kasus HIV AIDS di Kota Sawahlunto secara kumulatif dari tahun 2002 s/d 2022 berjumlah 40 kasusnya yang tersebar diseluruh kota sawahlunto, kasus terbanyak terdapat di Kecamatan Talawi yaitu sebanyak 13 kasus sedangkan jika dilihat dari jenis kelamin kasus HIV AIDS banyak terdapat pada laki-laki, begitu juga dengan kasus yang meninggal juga banyak pada laki-laki sebagaimana yg tergambar pada diagram berikut :

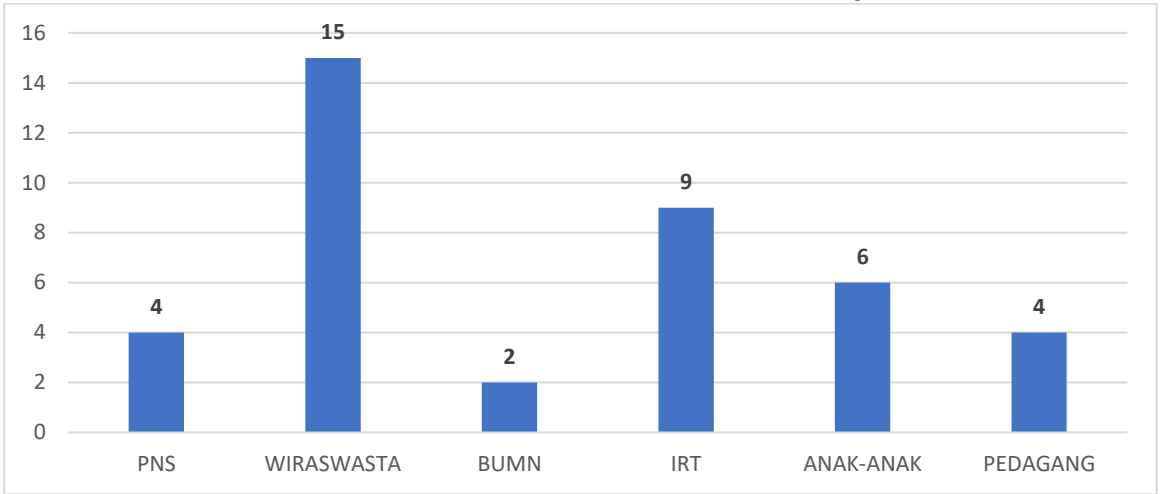
Gambar 3.7
KASUS HIV AIDS KOTA SAWAHLUNTO BERDASARKAN
JENIS KELAMIN DARI TAHUN 2002 S/D 2022



Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2022

Orang yang terinfeksi penyakit HIV ADS tida melihat Jenis pekerjaanya, semua orang bisa terkena jika melakukan faktor-faktor resiko penularan HIV AIDS, pekerjaan wiraswsta paling tinggi seperti yang tergambar pada gafik berikut :

Gambar 3.8
KASUS HIV AIDS KOTA SAWAHLUNTO BERDASARKAN
JENIS PEKERJAAN DARI TAHUN 2002 S/D 2022



Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2022

Jika dilihat dari jenis pekerjaan kasus AIDS berasal dari berbagai profesi dan yang terbanyak ada pada wiraswasta dan 6 orang juga penderitanya anak-anak yang tertular dari orang tua mereka pasca melahirkan hal ini disebabkan karena kurang tahunya penderita dengan faktor resiko yang di lalunya.

kasus HIV AIDS kota sawahlunto ini kebanyakan masyarakat yang pergi merantau dan setelah pulang kembali ke kampung makanya banyak kasus yang ditemukan sudah dalam stadium yang menunjukkan sudah ada bergejala

C. Status Gizi

1. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk adalah balita usia 0 - 59 bulan dengan tanda klinis gizi buruk atau indeks berat badan menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dengan nilai Z-score kurang dari -3 SD atau lingkaran lengan atas < 11,5 cm bagi balita 6 - 59 bulan.

Tahun 2021 target 7,8 realisasi 0,04 sementara tahun 2022 dari target 7,5 realisasi 0,07 adanya penurunan balita gizi bururk dari tahun 2021 disebabkan beberapa hal yang dilakukan seperti :

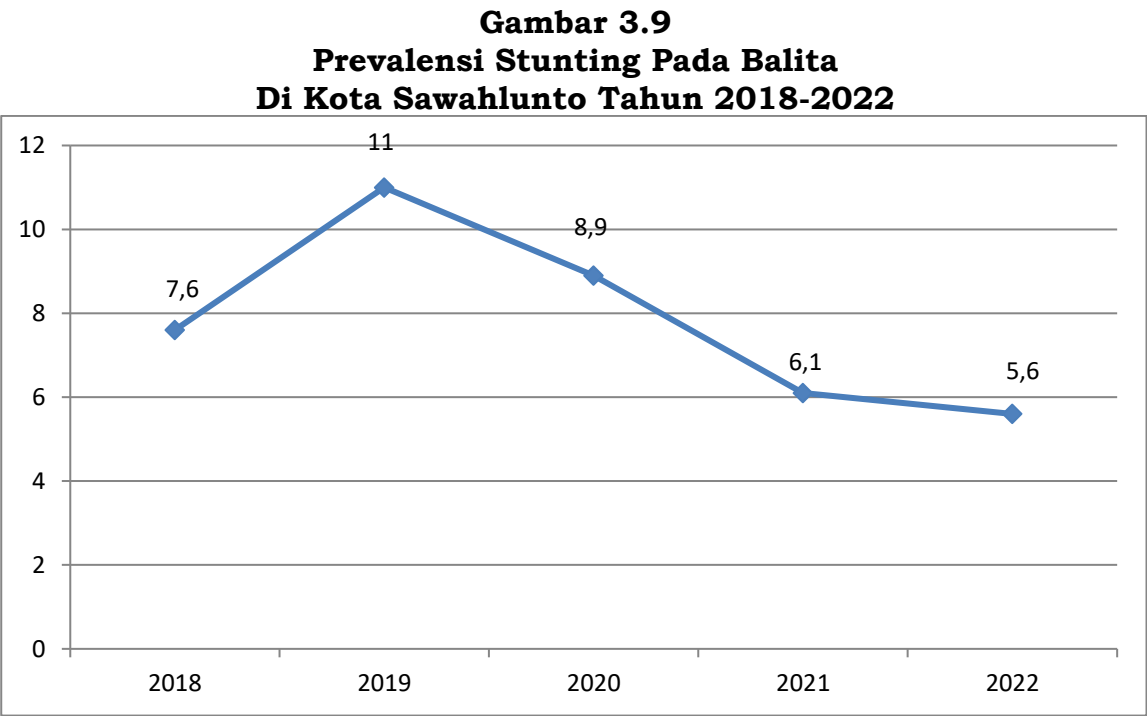
- Pelaksanaan kelas balita
- Pembentukan rumah/pos gizi dimasing - masing desa/kelurahan
- Sinergisitas program/kegiatan dengan lintas sektor terkait
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita
- Desiminasi hasil surveilans gizi dengan lintas program dan lintas sector

2. Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) Balita

Stunting merupakan kondisi dimana tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan tinggi badan seusianya. Stunting merupakan kondisi pendek dan sangat pendek. Di kota Sawahlunto Angka Stunting adanya kecendrungan menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain :

- Rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, hal ini dapat dilihat bahwa masih adanya ibu hamil mengalami anemia dan KEK pada awal kehamilan.

- b) Masih adanya balita yang mengalami wasting (Kurus).
 - c) Masih adanya balita yang sangat kurus dan disertai penyakit penyerta
- Prevalensi stunting di Kota Sawahlunto dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Data E-PPGB Laporan Tahunan DinkesdaldukKB Tahun 2018-2022

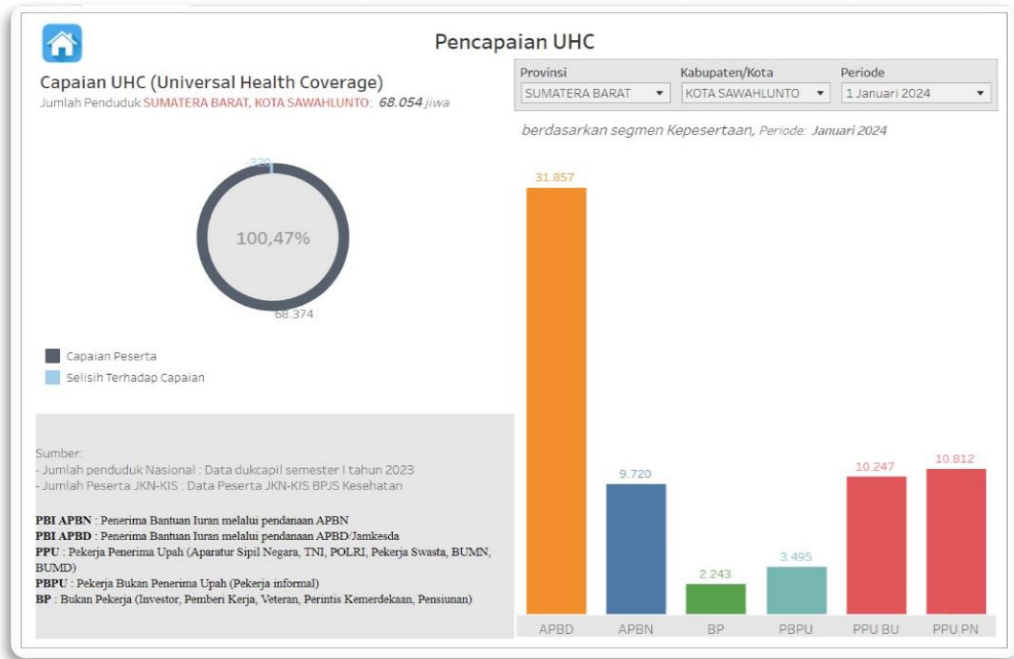
- Penatalaksanaan yang telah dilakukan anatara lain :
1. Memberikan pelayanan kepada ibu hamil sesuai standar (10T) yang salah pelayanannya penjarangan ibu hamil anemi dan ibu hamil KEK.
 2. Memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil yang mengalami KEK.
 3. Memberikan makanan tambahan kepada balita yang mengalami wasting (Kurus) dan balita yang sangat kurus.
 4. Penyuluhan tentang pentingnya pemberian Asi Eksklusif kepada bayi sampai umur 6 bulan.
 5. Sudah banyak dibentuk Pos Gizi di Wilayah kerja Puskesmas Se Kota Sawahlunto.

- D. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat**
- Universal Helath Coverage (UHC) merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial. Di Indonesia, UHC ini diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pada 2024 ini, kepesertaan JKN yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 sedikitnya sebesar 98 persen dari total populasi.
- Tujuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Sawahlunto Sehat ke dalam Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai berikut :
- A. Agar peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Sawahlunto yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara tepat, cepat dan aman di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - B. Menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Kota Sawahlunto;
 - C. Mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Sawahlunto.

Universal Health Coverage (UHC) di Kota Sawahlunto pada tahun 2023 sudah 100,47%. Pencapaian UHC ini tidak lepas adanya dukungan dari Pemerintah Kota Sawahlunto yang memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota (Jamkesko) dengan pembiayaan 100% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto. Selain itu juga adanya Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) pembiayaannya merupakan sharing dana antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Sawahlunto yang tertuang didalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato Ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Sawahlunto, dengan rincian 80% pembiayaan bersumber dari APBD Kota Sawahlunto dan 20% pembiayaan dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Selain itu juga adanya masyarakat miskin yang mendapatkan Jaminan Kesehatan yang bersumber dana dari APBN. Peserta Jaminan Kesehatan untuk mendukung UHC di Kota Sawahlunto terdiri dari:

1. Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Sawahlunto (Jamkesko)
2. Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS)
3. Penerima Bantuan Iuran pendanaan APBN
4. Pekerja Penerima Upah (PPU) seperti Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Pekerja Swasta, BUMN dan BUMD)
5. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) seperti pekerja informal
6. Bukan Pekerja (BP) seperti Investor, pemberi kerja, veteran, perintis kemerdekaan, pensiunan.

Gambar 3.10
Pencapaian Universal Health Coverage (UHC)
Di Kota Sawahlunto Tahun 2023



Sumber : Aplikasi BPJS Kota Sawahlunto Tahun 2023

3.2 Isu Strategis

3.2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana. Isu trategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Dinas Kesehatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2018–2023 dapat dirasakan manfaat serta dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Kelujarga Berencana. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Dinas Kesehatan sebagai organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Mortalitas	Jumlah Kematian Bayi	- Adanya Faktor pemenuhan nutrisi ibu hamil dan genetik karna sebagian besar penyebab kematian ibu adalah kelainan kongenital
			- Kurangnya Pengetahuan Ibu tentang pendidikan kesehatan terutama sebelum dan selama kehamilan
			- Kurangnya motivasi ibu dalam membaca Buku KIA yang berisi informasi kesehatan mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir bahkan sampai Balita
		Jumlah Kematian Ibu	- Kurangnya pengetahuan Ibu hamil, bersalin dan nifas dalam mengenali tanda-tanda bahaya yang memerlukan rujukan segera
			- Kurangnya motivasi ibu hamil deteksi dini komplikasi dan penyakit penyerta dengan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			- Adanya faktor Sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keluarga dalam melakukan rujukan ibu hamil, bersalin dan nifas ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
2	Morbilitas	bayi yang ditimbang di Posyandu	- Kurang menariknya posyandu bagi masyarakat.
			- Kurangnya motivasi ibu balita membawa anaknya ke posyandu yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi keluarga
		Stunting	- rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi
			- Adanya Balita dengan Status Gizi buruk dengan penyakit penyerta

3.2.2 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita. Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran strategis Kementerian Kesehatan pada RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

- A. Meningkatkan Kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
- B. Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan;
- C. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- D. Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan;
- E. Meningkatkan pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar;
- F. Terjaminnya pembiayaan Kesehatan;
- G. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- H. Meningkatkan efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

3.2.3 Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai instansi teknis bidang kesehatan di Kota Sawahlunto, Renstra Dinas Kesehatan mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Renstra Kementrian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kementrian Kesehatan maupun melalui peran aktif masyarakat untuk kurun

waktu 2015 – 2019 dan memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan Sustainable development Goals (SDG's).

Penyusunan tujuan, sasaran dan kebijakan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto diharapkan dapat berkesinambungan dengan kebijakan kesehatan di tingkat Pusat maupun di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.5
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

No	Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Misi 1 Provinsi Sumatera Barat : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat , berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Pola hidup yang tidak sehat yang mempengaruhi derajat kesehatan	Perlu peningkatan layanan kesehatan bagi semua penduduk
					Adanya pemeriksaan atau skrinning kesehatan melalui posbindu -PTM
		Menurunnya Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Adanya penyakit penyerta serta pola pemenuhan nutrisi yang tidak sesuai pada balita	Adanya kelompok lansia sehat
					Adanya dukungan dari lintas program dan lintas sektor
					Telah dibentuknya Pos Gizi di setiap desa/kelurahan

3.3 Penentuan Isu Strategis

Guna meningkatkan fungsi dan kinerja Dinas Kesehatan, maka diperlukan penentuan isu-isu strategis yang diharapkan menjadi landasan untuk menyusun kebijakan perencanaan. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi diantaranya sebagai berikut :

1. Status Kesehatan Masyarakat masih rendah ditandai dengan masih tingginya Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kematian Ibu;
2. Masih ditemukannya kasus stunting pada Balita di Kota Sawahlunto;
3. Meningkatnya pengendalian penyakit menular, tidak menular dan penyehatan lingkungan.

4. Meningkatkan persentase keluarga sehat 42 % dengan Indeks keluarga sehat 0,42.
5. Memantapkan pelaksanaan kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) melalui Universal Health Coverage (UHC)
6. Kebijakan penatalaksanaan untuk perbaikan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan melalui perbaikan tata kelola baik Sumber Daya Manusia, fasilitas kesehatan dan sarana prasarana.
7. Meningkatkan kesehatan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan“, maka diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025, visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera.

Secara umum tujuan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. “ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergambar dari pendapatan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan merata, penurunan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kemiskinan “. Untuk mencapai tujuan tersebut secara makro dikemukakan melalui proyeksi sejumlah indikator kesejahteraan sosial.

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun mendatang.

4.1.1 Tujuan

Tujuan perangkat daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah dan tertuang didalam Renstra sebagai berikut :

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja Tujuan :
 - a. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)(Tahun)
 - b. Prevalensi Stunting
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas
Indikator Kinerja Tujuan :
 - a. Nilai Sakip

4.1.2 Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Kesehatan
2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga berencana.
4. Terlaksananya manajemen regulasi dan akuntabilitas kinerja yang berkualitas

Seperti yang tertuang dalam tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
 Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN			
				2024	2025	2026	Kondisi Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka Usia Harapan Hidup (AHH)(Tahun)	70,4	70,45	70,60	70,60
			Prevalensi Stunting	13,00	12,50	10,60	10,60
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Layanan Rujukan (%)	100	100	100	100
			Cakupan Layanan Dasar (%)	100	100	100	100
			Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	0,16	0,16	0,16	0,16
			Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100	100	100	100
			Persentase Puskesmas terakreditasi	100	100	100	100
			Rasio Tenaga Kesehatan per satuan Penduduk	0,39	0,39	0,39	0,39
			Persentase SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya	90	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kasus Kematian Bayi	14	10	7	31
			Jumlah Kasus Kematian IBU	1	1	1	3

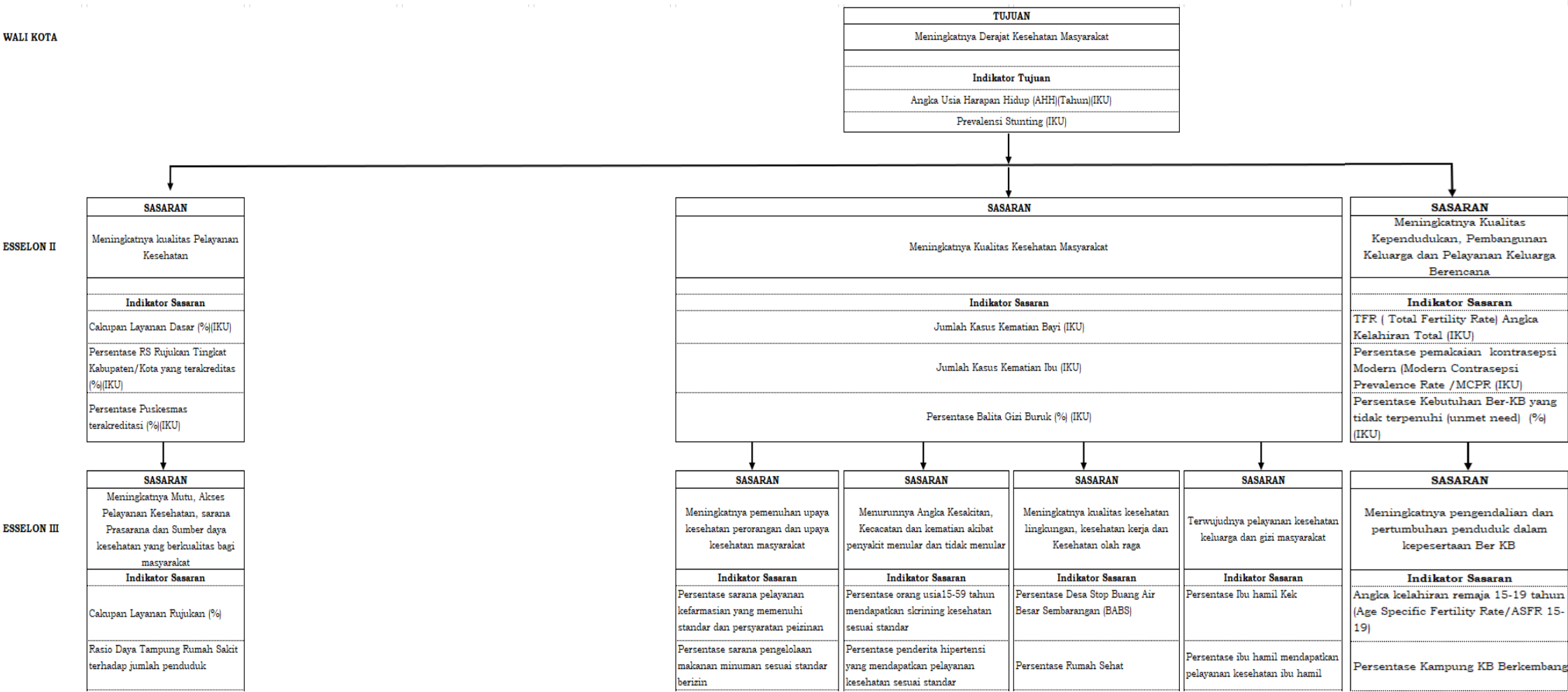
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN			
				2024	2025	2026	Kondisi Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Persentase Balita Gizi Buruk (%)	7,3	7,1	7	7
			Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan peizinan	80	85	90	90
			Persentase sarana pengelolaan makanan minuman sesuai standar berizin	80	85	90	90
			Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan	50	75	100	100
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100	100	100
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100	100	100
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100	100	100
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	100	100
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN			
				2024	2025	2026	Kondisi Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100
			Persentase warganegara usia 60 tahun ke atas mendapatkanskrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
			Persentase penderitaDM yang mendapatkan pelayanan kesehatansesuai standar (%)	100	100	100	100
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100	100
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100	100
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN			
				2024	2025	2026	Kondisi Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga berencana	TFR (Total Fertility Rate) Angka Kelahiran Total	2,2	2,18	2,16	2,16
			Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate /MCPR	66	68	70	70
			Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,2	12	11,6	11,6
			Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga	86	87	88	88
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas		Nilai SAKIP	62.19	62.50	62.81	62.81
		Terlaksananya manajemen regulasi dan akuntabilitas kinerja yang berkualitas	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	B	B	BB	BB

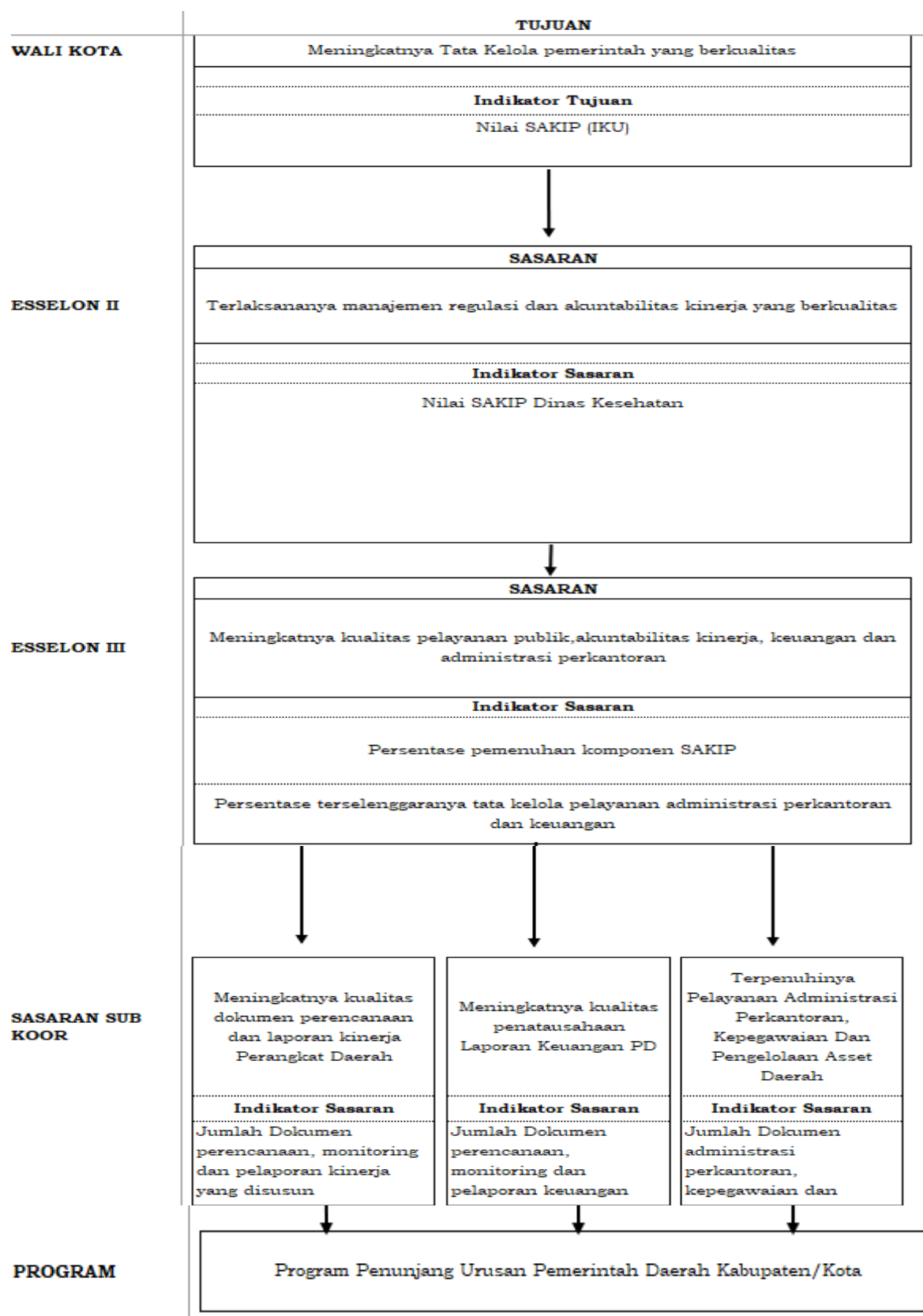
4.1 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Gambar 4.1
Cascading Kinerja Perangkat Daerah



Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk		Persentase sarana pengelolaan makanan minuman sesuai standar berizin	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Rumah Sehat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase Kampung KB Berkembang
Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk		Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan (UHC)	Persentase penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persentase peserta KB Baru
Persentase SDM Kesehatan yang Terlatih sesuai dengan kompetensinya (%)		Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase pembinaan upaya kesehatan kerja formal dan informal	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan yang siap melayani KB MKJP
Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi (%)		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan sesuai standar dan memenuhi syarat kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pengukuran Indikator Nasional Mutu sesuai standar		Persentase Posyandu yang aktif	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase instansi yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat diwilayah kerjanya	Persentase warganegara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan S (delapan) fungsi keluarga
Persentase Puskesmas dengan nilai capaian KBK minimal 90%		Indeks Keluarga sehat	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada Balita	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (SDGs)	Persentase Balita Wasting	Persentase Pelayanan KB Pasca Salin
Persentase ketersediaan alat kesehatan, sarana dan prasarana sesuai standar ASPAK		Persentase Tempat praktek mandiri yang diberikan rekomendasi izin praktek	Persentase imunisasi Lanjutan lengkap pada Baduta	Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)	Persentase D/S balita	Persentase ketersediaan Alokasi
Indeks Kepuasan Masyarakat		Persentase kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup sehat yang dilakukan	Persentase KLB penyakit dan keracunan yang dilakukan investigasi/penyelidikan epidemiologi	Persentase Jemaah haji yang diukur kebugaran jasmaninya	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Persentase peserta KB Aktif
Persentase Puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL			Persentase anak yang medapat imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah			Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu ISU kependudukan
Persentase puskesmas dengan ketersediaan Obat indikator			Persentase WUS yang memiliki status imunisasi T2			Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan
Persentase pemeliharaan Alat Kesehatan, sarana prasarana RS			Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini yang Direspon			Persentase masyarakat yang terjangkau program bangga kencana
Persentase Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit						Persentase penyuluh KB yang berkinerja baik
Persentase Indikator SPM Rumah Sakit						Persentase pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)

SASARAN SUB KOOR	Persentase SPM Bidang Penunjang								
	Persentase SPM Bidang Pelayanan								
	Persentase SPM Bidang Tata Usaha								
	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN
	Terpenuhinya Mutu, sarana dan prasarana Fasilitas kesehatan sesuai standar	Meningkatnya kualitas SDM dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan RS	Terlaksananya Promosi Kesehatan dan Pengembangan RS	Terlaksananya Perencanaan dan Pelaporan RS secara Terpadu	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan, Pengendalian, pengawasan sediaan Farmasi, alat kesehatan, makanan, minuman melalui promosi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Tersedianya data kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular	Tersedianya akses terhadap peningkatan penyehatan lingkungan, akses air minum serta meningkatnya kesehatan kerja dan olahraga	Terlaksananya pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	Terpenuhinya kepesertaan ber KB
	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran
	Persentase kecepatan pelayanan dokter di gawat darurat setelah pasien datang	Persentase Karyawan yang Mendapatkan Pelatihan minimal 20 jam per tahun	Persentase pasien yang mendapatkan informasi/ penyuluhan kesehatan	Jumlah aplikasi sistem informasi pencatatan dan pelaporan RS yang dilakukan pengisian sesuai ketentuan	Jumlah sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi yang diterbitkan	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (SDGs)	Jumlah balita gizi buruk	Jumlah kelompok kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 (delapan) fungsi keluarga
	Persentase ketepatan waktu tunggu di rawat jalan	Persentase Ketepatan Waktu Pengusulan Kenaikan Pangkat	Persentase kecepatan waktu tanggap complain	Persentase Kelengkapan Laporan Akuntabilitas	Jumlah Posyandu yang aktif	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Kampung KB yang berkembang



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Arah kebijakan berfokus pada indentifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai Untuk meujudkan tujuan dan sasaran maka pada bagian ini dirumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang, sebagaimana pada Tabel di bawah ini:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan 1 Kota : Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan	Mengoptimalkan pemenuhan SPM bidang Kesehatan	Mengoptimalkan pemenuhan dan pelaksanaan SPM bidang Kesehatan	Mengoptimalkan evaluasi SPM bidang Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		upaya kesehatan masyarakat	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
			Memberikan jaminan kesehatan masyarakat	Mengoptimalkan pelayanan terhadap jaminan kesehatan masyarakat	Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jaminan kesehatan masyarakat
			Memberikan pelatihan terkait dengan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Implementasi Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatkan monitoring dan evaluasi Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Mendorong peran serta masyarakat dan stakeholder dalam promosi kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam promosi kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam promosi kesehatan melalui monitoring dan evaluasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga berencana	Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk	Melaksanakan koordinasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Melaksanakan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Melaksanakan evaluasi terhadap sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatkan Pendayagunaan dan evaluasi terhadap Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
			Meningkatkan Pengendalian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	Meningkatkan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
			Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka menjadikan keluarga yang sejahtera	Meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat dalam rangka menjadikan keluarga yang sejahtera	Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap masyarakat dalam rangka menjadikan keluarga yang sejahtera

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		Percepatan pencegahan stunting	Melaksanakan aksi konvergensi untuk pencegahan stunting	Melanjutkan aksi konvergensi untuk pencegahan stunting	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap aksi konvergensi untuk pencegahan stunting
			Meningkatkan peranan pos gizi di setiap desa/kelurahan	Melanjutkan penguatan peranan pos gizi di setiap desa/kelurahan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap peranan pos gizi di setiap desa/kelurahan
			Memberikan gizi spesifik untuk ibu hamil dan menyusui	Menguatkan Intervensi gizi spesifik untuk ibu hamil dan menyusui	Mengevaluasi terhadap Intervensi gizi spesifik untuk ibu hamil dan menyusui
			Memberikan gizi sensitif untuk remaja putri, pasangan usia subur dan masyarakat umum	Menguatkan Intervensi gizi sensitif untuk remaja putri, pasangan usia subur dan masyarakat umum	Mengevaluasi Intervensi gizi sensitif untuk remaja putri, pasangan usia subur dan masyarakat umum
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Terlaksananya manajemen regulasi dan akuntabilitas kinerja yang berkualitas	meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Menyusun perencanaan dan pegangan tahun 2024	Menyusun perencanaan dan pegangan tahun 2025	Menyusun perencanaan dan pegangan tahun 2026
			melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Meningkatkan kualitas Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	mengoptimalkan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatkan kualitas Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah	mengoptimalkan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
			melaksanakan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	meningkatkan kualitas Pengelolaan update Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	mengoptimalkan Pengelolaan update Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		meningkatkan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2024	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2025	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2026
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang terangkum dalam dokumen RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024- 2026.. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto tahun 2024 – 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 sampai dengan 2026
Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penangg ung jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkat nya Derajat Kesehatan Masyarakat							Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan moralitas menurut umur	Tahun	71.4	70.42	70.40		70.45		70.60		70.60				
								Prevalensi Stunting	Jumlah anak balita sangat pendek (stunting)	Persenta se	13.7	2.65	13.00		12.50		10.60		10.60			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penangg ung jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								dalam waktu tertentu dibagi jumlah anak balita pada waktu yang sama di kali 100														
	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Kesehatan							Cakupan Layanan Rujukan (%)	Persen	100	100	100		100		100		100	-			
									Cakupan Layanan Dasar (%)	Persen	100	100	100		100		100		100			
		1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit yang tersedia dibagi Jumlah Penduduk x 100	Persen	0.15	0.16	0.16		0.16		0.16		0.16			
								Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	Jumlah RS Rujukan tingkat yang terkreditasi dibagi jumlah RS di kab/ Kota	Persen	100	100	100	5,199,428,1 18	100	5,720,991, 768	100	5,834,437,500	100	11,585,982,38 6		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penanggu ng jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
									Sawahlunto x100													
								Persentase Puskesmas terakreditasi	Jumlah puskesmas terakreditasi dibagi jumlah seluruh puskesmas x 100	Persen	100	100	100		100		100		100			
		1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah kabupaten/Kot a	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM Kewenangan daerah Kabupaten/Kota		Bulan	12	12	12	4,864,428,118	12	5,364,000,000	12	5,549,100,000	12	10,608,653,118		
		1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun		Unit	0	0	0		2	250,000,000	0	0	2	250,000,000		
		1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Unit	0	0	0		0	-	0	0	0	-		
		1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan		Unit	0	1	2	1,000,000,000		1,050,000,000		1,102,500,000	2	3,152,500,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penanggu ng jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								Oleh Rumah Sakit (RSUD)														
		1	02	02	2.001	009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		Unit	0	0	1	174,428,118	1	250,000,000	0	0	2	424,428,118		
		1	02	02	2.001	010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		Unit	0		1	200,000,000	3	150,000,000	3	600,000,000	7	950,000,000		
		1	02	02	2.001	010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya(RSUD)		Unit	0	2	1	120,000,000	3	126,000,000	3	132,300,000	7	378,300,000		
							011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	umlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		Unit	0	0	3	60,000,000		63,000,000		66,150,000		189,150,000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penangg ung jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		Unit		10	10	100,000,000	50	100,000,000	50	105,000,000	110	305,000,000		
		1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (RSUD)		Unit	2	0	5	1,400,000,000	5	1,470,000,000	5	1,543,500,000	15	4,413,500,000		
		1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Dinkesdaldukkb)		Alkes		100	36	95,000,000	120	96,000,000	120	100,800,000	276	291,800,000		
		1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (RSUD)		Unit	0	178	188	180,000,000	193	189,000,000	198	198,450,000		198,450,000		
							0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap		Unit	0	1	1	700,000,000	1	735,000,000	1	771,750,000			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penang ung jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000														
						0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan (Paket)		Paket	2	2	2	575,000,000	2	600,000,000	2	630,000,000	2	1.805.000.000		
						0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan (Paket)		Paket	0	0	1	250,000,000	1	262,500,000	1	275,625,000	3	788.125.000		
		1	02	02	201	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya		KK	16302	10362	13000	10,000,000	16650	10,500,000	16750	11,025,000	16750	31,525,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penanggu ng jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas														
		1	02	02	2.001	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		Bulan	12	12	0	-	12	12,000,000	12	12,000,000	24	24,000,000		
		1	02	02	2.002		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terfasilitasinya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota		Bulan			12	290,000,000	12	284,741,768	12	209,475,000	12	784,216,768		
		1	02	02	2.002	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Faskes	0	0	6	100,000,000	1	85,241,768	0	0	7	185,241,768		
		1	02	02	2.002	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (RSUD)		RSUD	0	1	1	190,000,000	1	199,500,000	1	209,475,000	3	598,975,000		
		1	02	02	2.004		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan	Terselenggaranya penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dab fasilitas pelayanan		Dokumen			7	45,000,000	7	72,250,000	7	75,862,500	7	193,112,500		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisasi kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota														
		1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		Faskes	0	0	6	35,000,000	12	36,750,000	12	38,587,500	30	110,337,500		
		1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		Faskes	6	6	7		7	25,000,000	7	26,250,000	21	51,250,000		
		1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Dokumen	4	4	1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,025,000	3	31,525,000		
		1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk	Jumlah dokter dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1000		-	13	0.40	1,595,000,000	0.39	1,603,000,000	0.39	1,611,400,000	988	4,809,400,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penangg ung jawab	Lo ka si																
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah																			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)																		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)																
							MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya	Jumlah SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya dibagi dengan jumlah tenaga kesehatan seluruhnya x 100				90		100		100		300																			
		1	02	03	2.01																		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kot a	Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota a		Bulan	0	1	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	150,000,000		
		1	02	03	2.01	0001																	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Dokume n	0	0	150	25,000,000	150	25,000,000	150	25,000,000	450	75,000,000		
		1	02	03	2.01	0002																	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Dokume n	0	1	1	25,000,000	150	25,000,000	150	25,000,000	301	75,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisasi kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1	0	0	2.		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Bulan	0	4	12	935,000,000	12	935,000,000	12	935,000,000	12	2,805,000,000		
		1	0	0	2.	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Dokumen	0	0	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	6	450,000,000		
		1	0	0	2.	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Orang	0	0	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	6	300,000,000		
		1	0	0	2.	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)		Orang	0	0	3	660,000,000	3	660,000,000	3	660,000,000	9	1,980,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penanggu ng jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1	0	0	2.	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Dokume n	0	4	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	6	75,000,000		
		1	0	0	2.		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota		Bulan	0	8	12	610,000,000	12	618,000,000	12	626,400,000	12	1,854,400,000		
		1	0	0	2.	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang	0	8	10	450,000,000	100	450,000,000	100	450,000,000	210	1,350,000,000		
		1	0	0	2.	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (RSUD)		Orang	0	0	20	160,000,000	20	168,000,000	20	176,400,000	60	504,400,000		
	Meningkat nya Kualitas							Jumlah kematian Bayi	Jumlah Kematian bayi	Orang	19.3	18	14		10		7		31			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penangg ung jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Kesehatan Masyarakat							pada satu tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu x 1000														
								Jumlah Kasus Kematian Ibu	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Orang	2	0	1		1		1		3			
								Persentase Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita gizi buruk dibagi jumlah balita di Kota Sawahlunto dikali 100	Persentase	0.06	7.30	7.3		7.1		7		7			
								Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi Jumlah ibu hamil di Kota Sawahlunto x 100%	Persen	65.4	100	100		100		100		100			
								Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%) Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi Jumlah ibu bersalin di Kota Sawahlunto x 100%	Persen	73.9	100	100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penangg ung jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/ko ta x	Persen	77.8	100	100		100		100		100			
								Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagiJumlah balita di Kota Sawahlunto x 100%	Persen	86.9	100	100		100		100		100			
								Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah anak usia pendidikan dasar di kota sawahlunto x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100			
								Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining	Usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining	Persen	40.4	100	100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penangg ung jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								kesehatan sesuai standar (%)	kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang usia 15-59 tahun di kota sawahlunto x 100%													
								Persentase warganegara usia 60 tahun ke atas mendapatkanskrining kesehatan sesuai standar (%)	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kota sawahlunto x 100%	Persen	51.7	100	100		100		100		100			
								Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita hipertensi di kota sawahlunto x 100%	Persen	23.7	100	100		100		100		100			
							Persentase penderitaDM yang mendapatkan pelayanan	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan	Persen	76.7	100	100		100		100		100				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penangg ung jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								kesehatansesuai standar (%)	kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita DM di kota sawahlunto x100%													
								Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita ODGJ di kota sawahlunto x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100			
								Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar dibagi dengan jumlah orang terduga TBC di Kota Sawahlunto di kali 100	Persen	41.2	100	100		100		100		100			
								Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	Persen	100	100	100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penanggu ng jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
									standar/Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kota sawahlunto x 100%													
		1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit yang tersediadibagi Jumlah Penduduk x 100	Persen	0.15	0.16	0.16	10,965,110,532	0.16	10,669,463,532	0.16	10,842,371,350	0.48	32,476,945,414		
								Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	Jumlah RS Rujukan tingkat yang terkreditasidibagi jumlah RS di kab/ Kota Sawahlunto x100	Persen	100	100	100		100		100		100			
								Persentase Puskesmas terakreditasi	Jumlah puskesmas terakreditasi dibagi jumlah seluruh puskesmas x 100	Persen	100	100	100		100		100		100			
		1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terfasilitasinya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota		Bulan	12	12	12	10,195,110,532	12	9,893,663,532	12	10,060,509,350	12	30,149,283,414		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penanggu ng jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1	0	0	2.	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	828	1263	1326	65,000,000	1392	57,000,000	1461	59,500,000	4179	181,500,000			
		1	0	0	2.	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	894	1205	1265	57,000,000	1688	28,900,000	1772	30,400,000	4725	116,300,000			
		1	0	0	2.	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	873	1110	1155	79,653,000	1213	79,653,000	1273	83,635,650	3641	242,941,650			
		1	0	0	2.	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3945	3944	4141	55,000,000	4384	55,000,000	4603	57,750,000	13128	167,750,000			
		1	0	0	2.	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	9667	9957	9957	65,000,000	9957	60,000,000	9957	60,000,000	29871	185,000,000			
		1	0	0	2.	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16464	23265	41,135	95,000,000	41,435	55,000,000	41,735	60,000,000	124305	210,000,000			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penangg ung jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1	0 2	0 2	2. 0 2	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	5062	4259	4472	70,000,000	4695	70,500,000	4930	74,025,000	14097	214,525,000		
		1	0 2	0 2	2. 0 2	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	3776	1445	16,14 1	65,000,000	16,34 1	30,000,000	16,541	35,000,000	49023	130,000,000		
		1	0 2	0 2	2. 0 2	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	661	498	907	81,000,000	932	30,000,000	962	35,000,000	2801	146,000,000		
		1	0 2	0 2	2. 0 2	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Orang	188	248	137	35,000,000	139	35,000,000	141	40,000,000	417	110,000,000		
		1	0 2	0 2	2. 0 2	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang	763	557	641	60,000,000	651	63,000,000	661	66,150,000	1953	189,150,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penanggu ng jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang	1052	1284	1,400	65,000,000	1,550	65,000,000	1,600	70,000,000	4550	200,000,000		
		1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen	1	1	1	25,000,000	1	25,000,000	1	26,250,000	3	76,250,000		
		1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		Dokumen	1	1	1	40,000,000	1	40,000,000	1	42,000,000	3	122,000,000		
		1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen	1	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	52,500,000	3	152,500,000		
		1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Dokumen	6	6	2	10,000,000	2	10,500,000	2	11,025,000	6	31,525,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penangg ung jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1	0 2	0 2	2. 0 2	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokume n	1	1	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	3	120,000,000		
		1	0 2	0 2	2. 0 2	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokume n	4	4	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	12	150,000,000		
		1	0 2	0 2	2. 0 2	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (RSUD)		Dokume n	0	0	12	50,000,000	12	52,500,000	12	55,125,000	36	157,625,000		
		1	0 2	0 2	2. 0 2	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Dokume n	0	6	6	25,000,000	6	25,000,000	6	26,250,000	18	76,250,000		
		1	0 2	0 2	2. 0 2	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokume n	1	1	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	3	90,000,000		
		1	0 2	0 2	2. 0 2	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Dokume n		1119	1130	25,000,000	1135	25,000,000	1140	25,000,000	3405	75,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penanggu ng jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		Dokume n	0	0	1	-	1	25,000,000	1	26,250,000	3	51,250,000		
		1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokume n	1	1	1	65,000,000	1	65,000,000	1	65,000,000	3	195,000,000		
		1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Dokume n	4	4	1	8,027,457,532	1	8,027,457,532	1	8,105,536,700	3	24,160,451,764		
		1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasio nal	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasion al yang Didistribusikan		Spesime n			100	-	100	30,000,000	100	30,000,000	300	60,000,000		
		1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraa n Kabupaten/Kot a Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Dokume n	1	1	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	3	105,000,000		
		1	02	02	2.02	0030	Penyediaan <i>Telemedicine</i> di Fasilitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang		Faskes	0	0	2	-	0	0	0	0	2	-		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penangg ung jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Pelayanan Kesehatan	Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan <i>Telemedicine</i> untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas														
		1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD)		Dokumen	0	0	12	175,000,000	12	183,750,000	12	192,937,500	36	551,687,500		
		1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Silungkang		Dokumen			4	50,000,000	4	25,000,000	4	26,250,000	4	101,250,000		
		1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Lunto		Dokumen			4	35,000,000	4	20,000,000	4	21,000,000	4	76,000,000		
		1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Kampung Teleng		Dokumen			4	40,000,000	4	20,000,000	4	21,000,000	4	81,000,000		
		1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan		Dokumen			4	40,000,000	4	20,000,000	4	21,000,000	4	81,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penangg ung jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								Puskesmas Sungai Durian														
		1	0 2	0 2	2. 0 2	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Kolok		Dokume n			4	40,000,000	4	20,000,000	4	21,000,000	4	81,000,000		
		1	0 2	0 2	2. 0 2	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Talawi		Dokume n			4	50,000,000	4	25,000,000	4	26,250,000	4	101,250,000		
		1	0 2	0 2	2. 0 2	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Dokume n	2	2	1	40,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	3	110,000,000		
		1	0 2	0 2	2. 0 2	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD IFK)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Dokume n	12	12	12	165,000,00 0	12	75,653,000	12	79,437,000	36	320,090,000		
		1	0 2	0 2	2. 0 2	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Dokume n	1	1	1	45,000,000	1	47,250,000	1	49,612,500	3	141,862,500		
		1	0 2	0 2	2. 0 2	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat	Jumlah <i>Public Safety Center</i> (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi		Unit	1	1	1	250,000,00 0	1	262,500,00 0	1	275,625,000	3	788,125,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penanggu ng jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Terpadu (SPGDT)	Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
		1	2	2	2.002	0046	Pengelolaan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		Dokume n	0	2	2	25,000,000	2	26,250,000	2	27,562,500	2	78,812,500		
		1	02	02	2.003		Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen Hasil penyelenggaraan sistem informasi kesehatan		Dokume n	1	3	3	85,000,000	3	85,000,000	3	85,000,000	9	255,000,000		
		1	02	02	2.003	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Dokume n	1	3	3	85,000,000	3	85,000,000	3	85,000,000	9	255,000,000		
		1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentrase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	Jumlah Sarana yang memenuhi standar dan pelayanan perizinan dibagi Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian x 100	Persenta se	23	67	80	145,000,000	85	150,800,000	90	156,862,000	90	374,662,000		
								Persentase sarana pengelolaan makanan	Jumlah Sarana pengelolaan makanan dan minuman	Persenta se			80		85		90		90			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penanggu ng jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								minuman sesuai standar berizin	yang memenuhi standar perizinandi bagi umlah Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman x 100													
		1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksana Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Bulan	1	10	12	33,000,000	12	33,900,000	12	35,654,500	12	102,554,500		
		1	02	04	2.01	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Dokumen	1	10	1	33,000,000	1	33,900,000	1	35,654,500	3	102,554,500		
		1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan	Terlaksananya sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas I tertentu		Bulan			12	25,000,000	12	26,250,000	12	26,750,000	12	78,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penangg ung jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga														
		1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Dokumen		0	4	25,000,000	4	26,250,000	4	26,750,000	4	78.000.000		
		1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Bulan	1	36	12	24,000,000	12	24,500,000	12	25,000,000	12	73,500,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penanggu ng jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1	0 2	0 4	2. 0 3	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Dokume n	1	36	1	24,000,000	1	24,500,000	1	25,000,000	3	73,500,000		
		1	0 2	0 4	2. 0 4		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terfasilitasinya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Bulan	1	1	12	24,000,000	12	25,200,000	12	26,460,000	12	75,660,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisasi kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Dokumen	1	1	1	24,000,000	1	25,200,000	1	26,460,000	3	75,660,000		
		1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Bulan	20	20	12	39,000,000	12	40,950,000	12	42,997,500	12	122,947,500		
		1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan		Unit	20	20	1	39,000,000	1	40,950,000	1	42,997,500	3	122,947,500		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penanggu ng jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan														
		1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan dibagi dengan jumlah poskesdes dan poskeskel yang ada x 100		3	3	50	540,000,000	75	540,000,000	100	540,000,000	100	1,620,000,000		
		1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Terselenggaranya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Bulan	1	1	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	450,000,000		
		1	02	05	2.01	001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			1	1	4	150,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000	12	450,000,000		
		1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Bulan	1	1	12	240,000,000	12	240,000,000	12	240,000,000	12	720,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Kabupaten/Kot a															
		1	02	05	2.002	0001	Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Dolume n	1	1	4	160,000,000	4	160,000,000	4	160,000,000	12	480,000,000		
		1	02	05	2.002	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Keluarg a	0	0	16504	80,000,000	16604	80,000,000	16704	80,000,000	16704	240,000,000		
		1	02	05	2.003		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	1	6	150,000,000	6	150,000,000	6	150,000,000	18	450,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penangg ung jawab	Lo ka si
														Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
												Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1	0	0	2.	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1	1	6	150,000,000	6	150,000,000	6	150,000,000	18	450,000,000			
	Meningkat nya kualitas kependud ukan,pem bangunan keluarga dan pelayanan keluarga berencana							TFR (Total fertility Rate (Angka Kelahiran total))	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya		2.02	2.2	2.2		2.18		2.16		2.16				
2		1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						2,379,823,000		2,161,344,150		2,268,438,858		6,809,606,008				
2		1	4	0	2			PROGRAM PENGENDALIA N PENDUDUK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate /MCPR	Jumlah Akseptor Aktif Moder dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100	Persent ase	64.4	69.21	66	350,400,000	68	30,450,000	70	31,000,000	91	411,850,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penangg ung jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		2	1 4	0 2	2. 0 1		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Bulan			12	107,400,000	-	-	-	-	12	107,400,000		
		2	1 4	0 2	2. 0 1	002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota		Dokume n	1	0	0	0	0	0	0	0	-			
		2	1 4	0 2	2. 0 1	0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		OPD	0	0	26	25,000,000	0	-	0	-	26	25,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penangg ung jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		2	1 4	0 2	2. 0 1	0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Dokumen	3	3	3	62,400,000	3	62,400,000	3	62,400,000	9	187,200,000		
		2	1 4	0 2	2. 0 1	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Laporan	12	12	37	20,000,000	37	22,000,000	37	25,000,000	111	67,000,000		
		2	1 4	0 2	2. 0 2		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Bukan			12	243,000,000	12	30,450,000	12	31,000,000	12	304,450,000		
		2	1 4	0 2	2. 0 2	0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan		Dokumen			1	25,000,000	0	0	0	0	1	25,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisasi kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Laporan	12	12	12	64,200,000	0	0	0	0	12	64,200,000		
		2	14	02	2.02	0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan		Data	1	1	1	8,000,000	0	0	0	0	1	8,000,000		
		2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		Data	1	1	1	5,000,000	1	5,250,000	1	5,500,000	3	15,750,000		
		2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Laporan	1		12	31,800,000	0	0	0	0	12	31,800,000		
		2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Dokumen	12	12	12	24,000,000	12	25,200,000	12	25,500,000	36	74,700,000		
		2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga		Unit			12	35,000,000	0	0	0	0	12	35,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisasi kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk														
		2	14	02	2.02	0017	Perumusan Parameter Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan		Dokumen		1	1	50,000,000	0	-	0	-	1	50,000,000		
		2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur)x 100	Persentase	6.6	13.4	12.2	1,336,543,000	12	1,403,370,150	11.6	1,473,538,658	11.6	4,213,451,808		
		2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terfasilitasi Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Bulan			12	475,680,000	12	499,464,000	12	524,437,200	12	1,499,581,200		
		2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		Laporan	4	4	4	40,000,000	4	42,000,000	4	44,100,000	12	126,100,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penanggu ng jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		2	1	0	2.	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Laporan	4	4	4	207,000,000	4	217,350,000	4	228,217,500	12	652,567,500		
		2	1	0	2.	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Laporan	12	12	12	62,400,000	12	65,520,000	12	68,796,000	36	196,716,000		
		2	1	0	2.	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Dokume n	20	20	35	70,640,000	35	74,172,000	35	77,880,600	105	222,692,600		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penanggu ng jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
		2	14	03	2.001	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		Dokumen	1	1	1	25,000,000	1	26,250,000	1	27,562,500	3	78,812,500		
		2	14	03	2.001	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Organisasi	23	23	23	70,640,000	23	74,172,000	23	77,880,600	69	222,692,600		
		2	14	03	2.002		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh		Bulan			12	339,600,000	12	356,580,000	12	374,409,000	12	1,070,589,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penangg ung jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Lapangan KB (PKB/PLKB)	KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)														
		2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Orang	235	200	150	74,000,000	150	77,700,000	150	81,585,000	450	233,285,000		
		2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Organis asi	23	23	23	177,600,000	232	186,480,000	232	195,804,000	487	559,884,000		
		2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Pen yuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Peny uluh Lapangan Keluarga		Laporan	12	12	12	162,000,000	12	170,100,000	12	178,605,000	36	510,705,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penanggu ng jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								Berencana (PKB/PLKB)														
		2	1 4	0 3	2. 0 3		Pengendalian dan Pendistribusia n Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Bulan			12	164,263,00 0	12	172,476,15 0	12	181,099,958	12	517,839,108		
		2	1 4	0 3	2. 0 3	0001	Pengendalian Pendistribusia n Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya		Laporan	12	12	12	3,150,000	12	3,307,500	12	3,472,875	36	9,930,375		
		2	1 4	0 3	2. 0 3	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode		Orang	218	243	250	118,113,00 0	265	124,018,65 0	270	130,219,583	785	372,351,233		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penangg ung jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Jangka Panjang (MKJP)	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
		2	14	03	2.03	008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Laporan	4	4	4	8,000,000	4	8,400,000	4	8,820,000	12	25,220,000		
		2	14	03	2.03	011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Laporan	12	12	12	5,000,000	12	5,250,000	12	5,512,500	36	15,762,500		
		2	14	03	2.03	016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		Orang	89	120	150	30,000,000	200	31,500,000	250	33,075,000	600	94,575,000		
		2	14	03	2.03		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		Orang	0	0	35	50,000,000	35	52,500,000	35	55,125,000	105	157,625,000		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penangg ung jawab	Lo ka si
														Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
												Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		2	1 4	0 3	2. 0 4		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terfasilitasinya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Bulan			12	357,000,000	12	374,850,000	12	393,592,500	12	1,125,442,500			
		2	1 4	0 3	2. 0 4	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Dokumen	0	0	2	207,000,000	12	217,350,000	12	228,217,500	26	652,567,500			
		2	1 4	0 3	2. 0 4	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Kampung KB	0	0	12	150,000,000	12	157,500,000	12	165,375,000	36	472,875,000			
		2	1 4	0 4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan	Jumlah semua kelompok ketahanan keluarga yang mendapatkan	Persen	80	85	86	692,880,000	87	727,524,000	88	763,900,200	261	2,184,304,200			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penanggu ng jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							SEJAHTERA (KS)	pembinaan 8 fungsi keluarga	informasi Bangga dibagi Semua 85Jumlah Ketahanan Kelompok yang ada x 100													
		2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terselenggarany a Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Bulan			12	692,880,000	12	727,524,000	12	763,900,200	12	2,184,304,200		
		2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)		Laporan	0	3	12	25,000,000	12	26,250,000	12	27,562,500	36	78,812,500		
		2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha		Unit	0	0	187	120,000,000	187	126,000,000	187	132,300,000	187	378,300,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penangg ung jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia														
		2	1 4	0 4	2. 0 1	0019	Orientasi/Pelat ihan Teknis Pelaksana/Kad er Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatih an Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Orang	0	85	543	150,000,00 0	543	157,500,00 0	543	165,375,000	543	472,875,000		
		2	1 4	0 4	2. 0 1	0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		Orang	0	0	200	50,000,000	200	52,500,000	200	55,125,000	200	157,625,000		
		2	1 4	0 4	2. 0 1	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,		Laporan	0	0	12	6,000,000	12	6,300,000	12	6,615,000	36	18,915,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penanggu ng jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)														
		2	14	04	2.001	023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		Dokume n	0	0	1	25,000,000	1	26,250,000	1	27,562,500	3	78,812,500		
		2	14	04	2.001	028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan		Kelompok	0	37	187	316,880,000	187	332,724,000	187	349,360,200	187	998,964,200		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang kat Daerah Penang g jawab	Lo ka si
													Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Realisa si kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Keluarga) yang Dibentuk														

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Realisasi kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Terlaksananya Pelayanan Publik berkualitas						Nilai SAKIP	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	Persen		72,83	62,19		62,77		63,35		63,35			
		1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					40.486.788.209		41.511.127.619		44.636.684.000		126.634.599.828			
		1	02				URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN														
		1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana (%)	Persentase	-	26	100	20.243.394.105	100	20.755.563.810	100	22.318.342.000	100	63.317.299.915	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Realisasi kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		12	12	13.939.914.000	12	14.357.991.420	12	15.486.446.426	12	43.784.351.846		
		1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		14	256	13.935.914.000	280	14.353.991.420	300	15.482.446.426	300	43.772.351.846		
		1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan		18	10	4.000.000	10	4.000.000	10	4.000.000	10	12.000.000		
		1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksannaya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan			12	7.310.650	12	7.310.650	12	7.310.650	12	21.931.950		
		1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan yang dihasilkan (dokumen)	Dokumen		2	2	2.561.000	2	2.561.000	2	2.561.000	2	7.683.000		
		1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian Barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian BMD (laporan)	Laporan		1	1	2.499.850	1	2.499.850	1	2.499.850	1	7.499.550		
		1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD yang dihasilkan (Laporan)	Laporan		2	2	2.249.800	2	2.249.800	2	2.249.800	2	6.749.400		
		1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan			12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	15,000,000		
		1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Realisasi kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi Umum perangkat daerah	Bulan			12	160.947.126	12	164.327.765	12	172.544.153	12	497.819.043		
		1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	Paket		4	4	8.822.250	4	8.998.695	4	9.448.630	4	27.269.575		
		1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	Paket		3	3	21.985.376	3	22.425.084	3	23.546.338	3	67.956.797		
		1	02	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	Paket		3	3	17.643.500	3	17.996.370	3	18.896.189	3	54.536.059		
		1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang cetakkan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	Paket		2	2	25.000.000	2	25.500.000	2	26.775.000	2	77.275.000		
		1	02	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	Dokumen		2	2	2.000.000	2	2.040.000	2	2.142.000	2	6.182.000		
		1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi (laporan)	Laporan		12	12	85.496.000	12	87.367.616	12	91.735.997	12	264.599.613		
		1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	Bulan		2	12	100.000.000	12	70.000.000	12	73.500.000	12	243.500.000		
		1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	Unit		1	1	50.000.000	1	35.000.000	1	36.750.000	1	121.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Realisasi kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	Unit		2	2	50.000.000	2	35.000.000	2	36.750.000	2	121.750.000		
		1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan		3	12	1.732.590.631	12	1.767.349.644	12	1.855.666.942	12	5.355.607.216		
		1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	Laporan		2	2	1.640.000	2	1.672.800	2	1.706.256	2	5.019.056		
		1	02	01	2.08	0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	Laporan		36	36	178.419.736	36	182.095.331	36	191.200.097	36	551.715.164		
		1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan (Laporan)	Laporan		12	12	1.552.530.895	12	1.583.581.513	12	1.662.760.589	12	4.798.872.996		
		1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan		3	12	960.700.000	12	979.914.000	12	1.044.019.980	12	2.984.633.980		
		1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	Unit		187	187	740.700.000	187	755.514.000	187	808.399.980	187	2.304.613.980		
		1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	Unit		1	2	150.000.000	2	153.000.000	2	160.650.000	2	463.650.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										Realisasi kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
							dan bangunan lainnya	dipelihara/direhabilita si (Unit)														
		1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Unit		2	2	70.000.000	2	71.400.000	2	74.970.000	2	216.370.000			
		1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah berstatus BLUD	Fasilitas Pelayanan		6	6	3.336.931.698	6	3.403.670.332	6	3.673.853.849	6	10.414.455.879			
		1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Puskesmas Kolok (Unit Kerja)	Unit Kerja	1	1	1	373.000.000	1	384.123.106	1	429.475.641	1	1.186.598.747			
		1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Puskesmas Sungai Durian (Unit Kerja)	Unit Kerja	1	1	1	575.000.000	1	586.123.106	1	631.475.641	1	1.792.598.747			
		1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Puskesmas Silungkang (Unit Kerja)	Unit Kerja	1	1	1	650.000.000	1	661.123.106	1	706.475.641	1	2.017.598.747			
		1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Puskesmas Talawi (Unit Kerja)	Unit Kerja	1	1	1	825.000.000	1	836.123.106	1	883.407.337	1	2.544.530.443			
		1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Puskesmas Kampung Teleng (Unit Kerja)	Unit Kerja	1	1	1	550.000.000	1	561.123.106	1	606.475.641	1	1.717.598.747			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Realisasi kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Puskesmas Lunto (Unit Kerja)	Unit Kerja	1	1	1	363.931.698	1	373.123.106	1	418.475.644	1	1.155.530.448		
		1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana (%)				100	20.243.394.104	100	20.755.563.809	100	22.318.342.000	100	63.317.299.913	RSUD	
		1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan yang terlaksana (bulan)	Bulan	12	12	12	10.440.248.972	12	10.652.135.587	12	11.510.374.493	36	32.602.759.052		
		1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	Orang	267	410	410	10.440.248.972	415	10.652.135.587	420	11.510.374.493	1245	32.602.759.052		
		1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian yang terlaksana (bulan)	Bulan	0	0	12	75.000.000	12	78.750.000	12	82.687.500	36	236.437.500		
		1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	Unit	0	0	25	75.000.000	26	78.750.000	27	82.687.500	78	236.437.500		
		1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum yang terlaksana (Bulan)	Unit	12	0	12	100.000.000	12	105.000.000	12	110.250.000	36	315.250.000		
		1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	Unit	0	0	1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000	3	157.625.000		
		1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)	Unit	1	0	1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000	3	157.625.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Realisasi kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan (Unit)	Unit	0	0	15	134.436.888	16	141.158.732	18	148.216.669	49	423.812.289		
		1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	0	0	15	134.436.888	16	141.158.732	18	148.216.669	49	423.812.289		
		1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana (bulan)	Paket	12	12	12	1.398.128.244	12	1.440.072.090	12	1.541.436.388	36	4.379.636.722		
		1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Dokumen	12	12	12	1.025.763.456	12	1.056.536.359	12	1.130.904.210	36	3.213.204.025		
		1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Dokumen	13	13	13	372.364.788	13	383.535.731	13	410.532.178	39	1.166.432.697		
		1	02	01	2.09		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana (bulan)	Dokumen	12	12	12	395.580.000	12	407.447.400	12	436.126.950	36	1.239.154.350		
		1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	27	28	28	395.580.000	28	407.447.400	28	436.126.950	84	1.239.154.350		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Realisasi kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya operasional pelayanan kesehatan rumah sakit (bulan)	Bulan	12	12	12	7.700.000.000	12	7.931.000.000	12	8.489.250.000	36	24.120.250.000		
		1	02	02	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Unit	0	0	1	7.700.000.000	1	7.931.000.000	1	8.489.250.000	3	24.120.250.000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pada bagian ini dikemukakan indikator Kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto yang secara langsung menunjukkan kinerja akan dicapai Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam tahun 2024-2026 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Tabel 7.1
Rencana Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Definisi Operasional/Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target Tahun			
				2024	2025	2026	Kondisi Akhir Renstra
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Cakupan Layanan Dasar (%)	Jumlah puskesmas yang menjalankan kegiatan UKM dan UKP dibagi dengan jumlah puskesmas dikali 100 %	100	100	100	100	100
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	Jumlah RS Rujukan tingkat yang terakreditasi/jumlah RS di kab/ Kota Sawahlunto x100 %	100	100	100	100	100
3.	Persentase Puskesmas terakreditasi	Jumlah puskesmas terakreditasi / jumlah seluruh puskesmas x 100 %	100	100	100	100	100
4.	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Jumlah Kematian bayi pada satu tahun tertentu	18	14	10	7	31
5.	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan	2	1	1	1	3
6.	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	jumlah Balita Gizi buruk/Jumlah Balita di Kota Sawahlunto x 100	0.07	7.3	7.1	7	7
7.	TFR (Total Fertility Rate) Angka Kelahiran Total	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya	2.02	2.2	2.18	2.16	2.16
8.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contracepsi Prevalence Rate /MCPR	Jumlah AkseptorAktif Moder/ Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100	70.46	66	68	70	70

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Definisi Operasional/Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target Tahun			
				2024	2025	2026	Kondisi Akhir Renstra
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	Jumlah PUS yang ingin ber - KB tetapi tidak terlayani/Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100	11.9	12.2	12	11.6	11.6

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 – 2026 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan selaku Kementerian Teknis. Rencana Strategi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026 disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto yang didalamnya memuat Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program serta kegiatan indikatif kurun waktu 2024 – 2026. Kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan. Untuk keberhasilan pencapaian visi, misi, target indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang sudah disusun, pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026 menjadi tanggung jawab bersama dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Jika dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



DESIGN BY Yalita Siswati SKM